



Kementerian PPN/  
Bappenas



ASEAN  
INDONESIA  
2023

*Kick Off Meeting Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara*

# Transformasi Daerah Menuju Kutai Kartanegara Emas dan Indonesia Emas 2045

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D  
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek  
Infrastruktur Prioritas Nasional

Kementerian PPN/ Bappenas

Tenggarong, 12 September 2023





# Daftar Riwayat Hidup



**Nama** : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D  
**Tempat/Tgl.Lahir** : Yogyakarta, 21 Januari 1965  
**Golongan** : IVD  
**Alamat Rumah** : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992  
**Alamat Kantor** : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310  
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195  
E-mail: [sumedi@bappenas.go.id](mailto:sumedi@bappenas.go.id) dan [sumediam@gmail.com](mailto:sumediam@gmail.com)

## PENDIDIKAN

1. *Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation (Government Thnik Thank)*. Harvard Kennedy School Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017
2. *Leadership in Succession and Talent Management*. Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education, Australia. 27 Okt – 1 Nov 2016
3. Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
4. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
5. S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
6. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
7. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

## PEKERJAAN

1. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Bappenas, Juli 2022-sekarang
2. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas, Sept 2020-Juli 2022
3. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas, Jan 2019-Sept 2020
4. Direktur Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bappenas. Sept 2016-Januari 2019
5. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah, Bappenas. Januari 2006-September 2016
6. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Mei 2004-Januari 2006
7. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas. Des. 2000-Mei 2004
8. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Mei 1999 –Desember 2000
9. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan, Bappenas. Maret 1994 –Januari 1997
10. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, Bappenas 1991-Maret 1994



# PESAN UTAMA

**Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 yang lebih berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat menjadi pondasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi menuju Indonesia Emas 2045.**

## **Megatren dan Tantangan Pembangunan Daerah:**

Migrasi dan Urbanisasi, Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, Perkembangan Teknologi, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

## **Indonesia Emas 2045:**

Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Ekologi, Wilayah dan Infrastruktur, Kestinambungan Pembangunan.

## **Benchmarking Pembangunan Daerah:**

Penataan Ruang Publik (Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman), Pelayanan Dasar (Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan)

## **Transformasi Kabupaten Kukar:**

Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari; Kesejahteraan Berkelanjutan; Ekonomi Sirkular; dan Rantai Nilai (*value chain*)

## **Penerapan Ekonomi Sirkular:**

Pengelolaan ekonomi dengan menerapkan praktik daur ulang 5R untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara:**

Kota Dunia untuk Semua, Tahapan, Prinsip dan Indikator Kinerja Utama, Kota hutan, Kota Sponge, dan Kota Cerdas, Super hub Ekonomi dan Daerah Mitra IKN

## **Kebijakan Pembangunan Perkotaan:**

Isu Strategis, Manajemen Risiko Bencana, Prinsip, Pendekatan Kebijakan, Tata Kelola dan Pengendalian Pembangunan.

## **Pengembangan Infrastruktur Daerah:**

Infrastruktur Mendukung Transformasi; Infrastruktur Berkelanjutan dan Tata Kelola Infrastruktur

## **Revitalisasi Kecamatan:**

Kecamatan sebagai Pusat, Data, Informasi, dan Pengetahuan; Pusat Pelayanan; Pusat Pemberdayaan; Pusat Inovasi dan Kewirausahaan; Pusat Pengelolaan SDA dan Kawasan Strategis

## **Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak:**

Membangun basis keunggulan komoaratif, kompetitif dan kolaboratif; Agenda Kerjasama Multipihak.



# Agenda Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045

**Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 yang lebih berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat menjadi pondasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan ekologi menuju Indonesia Emas 2045.**

## **Identifikasi Isu Strategis, Tantangan dan Skenario:**

Migrasi dan Urbanisasi, Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, Perkembangan Teknologi, Pelayanan Dasar dan Infrastruktur

## **Penjabaran Visi Indonesia Emas 2045:**

Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, Ekologi, Wilayah dan Infrastruktur, Kestinambungan Pembangunan.

## **Pembelajaran *Best Practices* Pembangunan:**

Konsep dan Strategi Penataan Ruang Publik (Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman), serta Pelayanan Dasar (Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan)

## **Konsep dan Arah Transformasi Daerah:**

Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari; Kesejahteraan Berkelanjutan; Ekonomi Sirkular; dan Rantai Nilai (*value chain*)

## **Penerapan Ekonomi Sirkular:**

Pengembangan Konsep dan Arah Pengembangan Ekonomi Sirkuler untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

## **Penyiapan Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara:**

Standar, Norma, Proses dan Kinerja Kota Dunia dalam Pelayanan, Tata Kelola dan Kinerja pembangunan

## **Kebijakan Pembangunan Wilayah:**

Review Konsep, Arah Kebijakan dan Masterplan Pembangunan Wilayah.

## **Penyediaan Infrastruktur Daerah:**

Infrastruktur Mendukung Transformasi; Infrastruktur Berkelanjutan dan Tata Kelola Infrastruktur

## **Revitalisasi Kecamatan:**

Pedoman dan Master Plan Kecamatan sebagai Pusat, Data, Informasi, dan Pengetahuan; Pelayanan; Pemberdayaan; Inovasi dan Kewirausahaan; Pusat Pengelolaan SDA dan Kawasan Strategis

## **Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak:**

Penyiapan Pola, Skema dan Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaboratif Multipihak untuk Membangun basis keunggulan komoaratif, kompetitif dan kolaboratif.





# Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

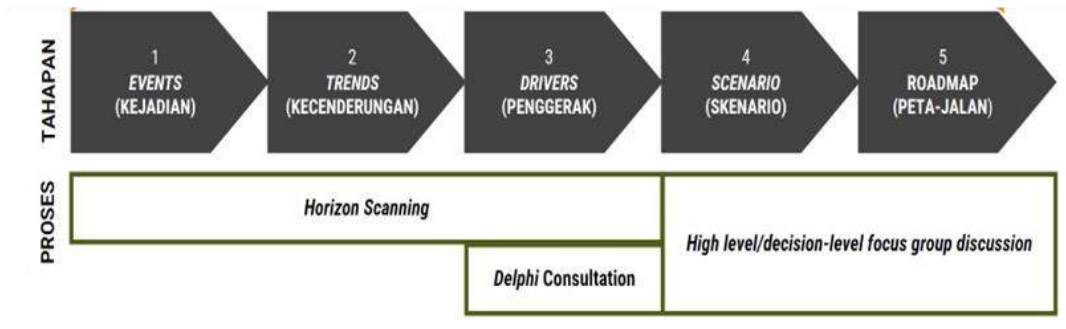


# Menyiapkan dan Membentuk Masa Depan

## Pendekatan dan Metode *Foresight*



TAHAPAN METODA **FORESIGHT:**



**MASA DEPAN  
DIBENTUK OLEH KITA**

*...bukan diprediksi, bukan diramalkan...*

Mengantisipasi Perubahan  
Merancang Perubahan  
Beradaptasi dengan Perubahan

*The **future** is **neither** predicted **nor** forecasted. **It is shaped.**  
Your—our— life is shaped. **If not by you**, or us, **then definitely by others.**  
(Ian Miles, 2004)*



# Kejadian, Kecenderungan dan Penggerak Perubahan Menuju Kabupaten Kutai Kartanegara Emas 2045

## Kejadian (*Events*)

- Ketergantungan komoditas
- Eksploitasi SDA
- Degradasi Lingkungan
- Perubahan Iklim dan Bencana
- Percepatan Perdagangan dan Investasi

## Kecenderungan (*Trends*)

- Demografi: Pertumbuhan dan Migrasi
- Perubahan Perilaku Sosial dan Budaya
- Transportasi dan Mobilitas Tinggi
- Perkembangan Teknologi Informasi
- Perkembangan Green Economy, Blue Economy dan Circular Economy

## Penggerak Perubahan (*Drivers of Change*)

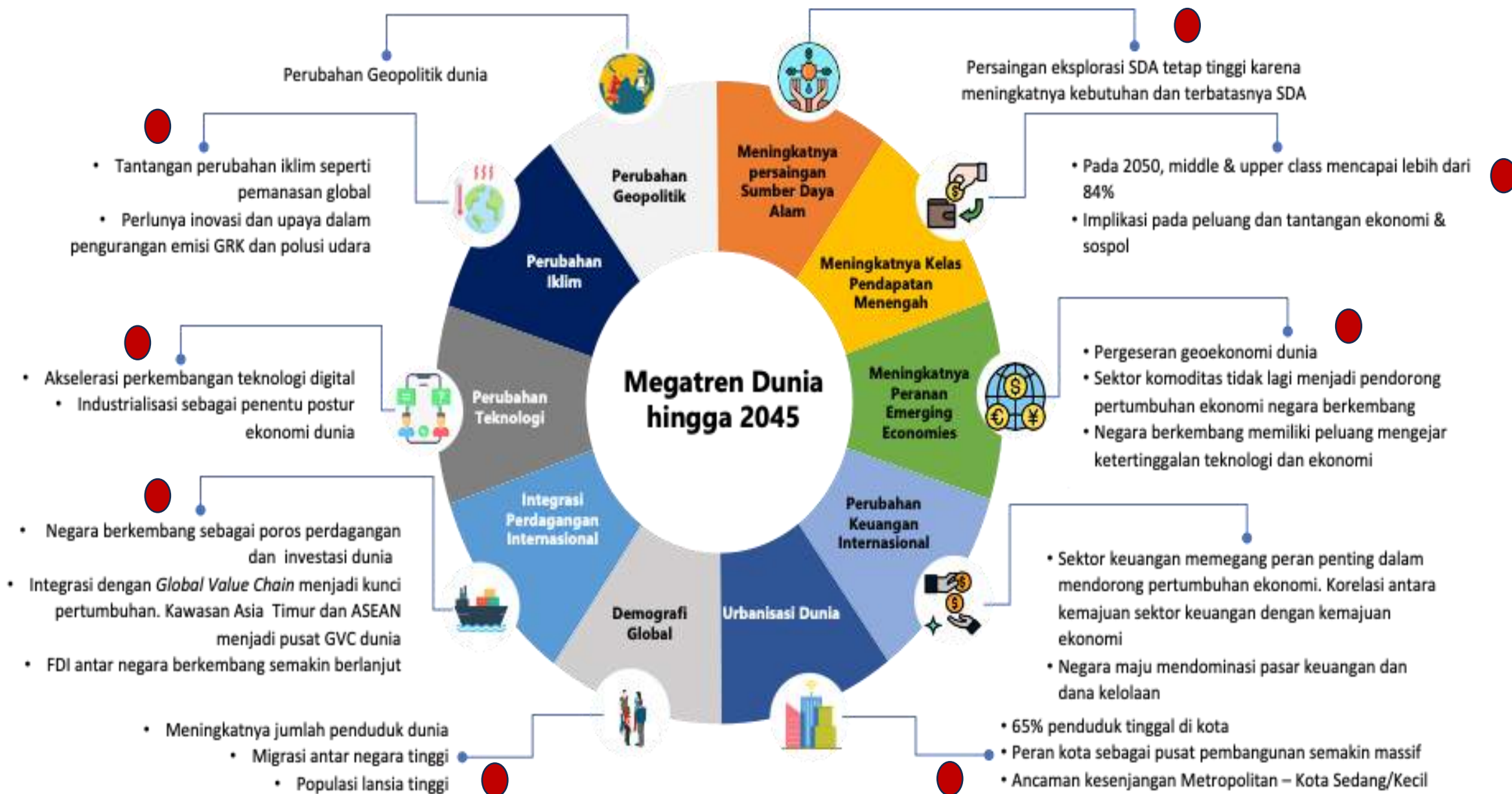
- SDM Berkualitas, Tangguh dan Adaptif
- Kualitas Pelayanan Publik
- Manajemen SDA dan Lingkungan Berkelanjutan
- Inovasi Desa dan Revitalisasi Kecamatan
- Konektivitas: Infrastruktur dan Digital
- Mitigasi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pembangunan IKN
- Kerjasama dan Kolaborasi Multipihak

**Transformasi Sosial, Ekonomi, Ekologi, dan Tata Kelola untuk mendorong akselerasi pembangunan desa, kecamatan dan kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat.**





# Megatren dan Tantangan Pembangunan

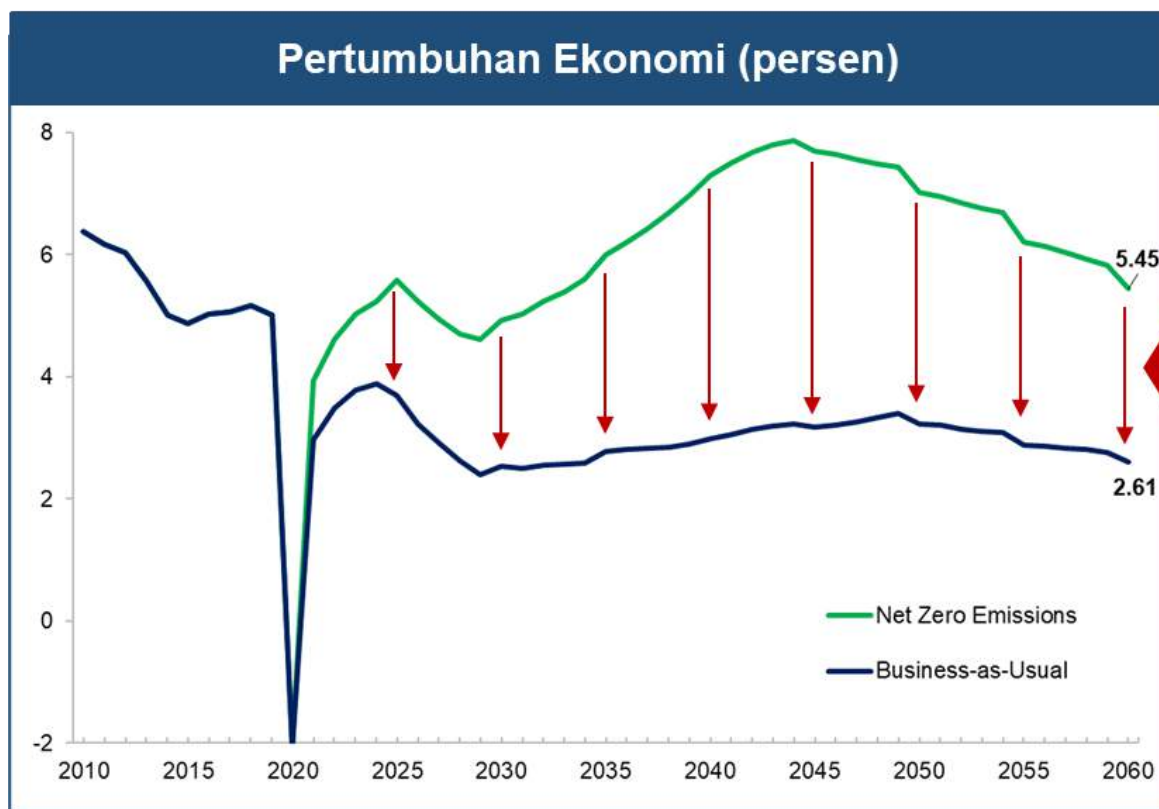






# Rancangan RPJPN 2025-2045: *Menjaga Kestinambungan Pembangunan*

Kebijakan *Business-as-Usual* menyebabkan *Carrying Capacity* akan terus menurun dan berimplikasi pada tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan



Penurunan  
*carrying capacity*

|              |  |
|--------------|--|
| Daya Dukung  | <b>Lahan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>10 juta hektar lahan hutan akan hilang dari 2025 sampai tahun 2060</li><li>Lahan pertanian akan terus menurun sampai</li><li>7 juta hektar</li><li>Produktivitas lahan sawah menurun menjadi 7 ton/ha/tahun akibat degradasi tanah</li></ul> |
|              | <b>Energi:</b> <p>Cadangan minyak dan gas hanya tersisa sekitar 0.3% dan 2% pada tahun 2060</p>  |
| Daya Tampung | <b>Emisi:</b> <p>Pada 2060, total emisi meningkat hampir 2x lipat dibandingkan level 2010</p>  |
|              | <b>Sampah:</b> <p>Kapasitas TPA Indonesia akan penuh sebelum tahun 2028</p>  |
|              | <b>Air:</b> <p>Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4.7 juta ton BOD per tahun.</p>   |
|              | <b>Udara:</b> <p>Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26.5 microgram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 microgram/hari)</p>   |



# Visi Indonesia Emas 2045



## INDONESIA EMAS 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

### Negara Nusantara

Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, ketahanan nasional, budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia

### Berdaulat

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian, ketahanan, dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri dan mengamankan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di wilayahnya.

### Maju

Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil.

### Berkelanjutan

Negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

## Lima Sasaran Utama Visi 2045

01

### Pendapatan per kapita setara negara maju

|                               | 2025<br>Baseline | 2045<br>Target |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| GNI Per Capita (USD)          | 5.500            | 30.300         |
| Kontribusi PDB Maritim (%)    | 7,6              | 17,5           |
| Kontribusi PDB Manufaktur (%) | 20,8             | 28,0           |

02

### Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

|                         | 2025<br>Baseline | 2045<br>Target |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Rasio Gini (indeks)     | 0,379-0,382      | 0,290-0,320    |
| Kontribusi PDRB KTI (%) | 20,6 (2022)      | 28,5           |

03

### Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

|                                 | 2025<br>Baseline | 2045<br>Target |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| Global Power Indeks (peringkat) | 34 (2023)        | 15 besar       |

04

### Daya saing sumber daya manusia meningkat

|                     | 2025<br>Baseline | 2045<br>Target |
|---------------------|------------------|----------------|
| Human Capital Index | 0,54 (2022)      | 0,73           |

05

### Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*

|                                    | 2025<br>Baseline | 2045<br>Target |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6             | 93,5           |



# Rancangan RPJPN 2025-2045: Sasaran dan Misi (Agenda) Pembangunan

**INDONESIA EMAS 2045**  
**Negara Nusantara**  
**Berdaulat, Maju dan**  
**Berkelanjutan**

## 5 Sasaran

1. Pendapatan per kapita **setara dengan negara maju** (sekitar US\$30.300),
2. Kemiskinan menuju **nol persen dan ketimpangan berkurang**,
3. **Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat**,
4. **Daya saing sumber daya manusia meningkat**
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca **menuju Net Zero Emission.**

## 8 Misi (Agenda)

### Transformasi Indonesia

Agenda 1: Transformasi Sosial  
Agenda 2: Transformasi Ekonomi  
Agenda 3: Transformasi Tata Kelola

### Landasan Transformasi

Agenda 4: Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi  
Agenda 5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

### Kerangka Implementasi Transformasi

Agenda 6: Wilayah dan Sarana Prasarana  
Agenda 7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan  
Agenda 8: Kestinambungan Pembangunan





# Rancangan RPJPN 2025-2045: Misi (Agenda) dan Arah Pembangunan

## 8 Misi (Agenda)

### Transformasi Indonesia

Agenda 1: Transformasi Sosial

Agenda 2: Transformasi Ekonomi

Agenda 3: Transformasi Tata Kelola

### Landasan Transformasi

Agenda 4: Supremasi Hukum, Stabilitas,  
dan Ketangguhan Diplomasi

Agenda 5: Ketahanan Sosial Budaya dan  
Ekologi

### Kerangka Implementasi Transformasi

Agenda 6: Wilayah dan Sarana Prasarana

Agenda 7: Sarana dan Prasarana yang  
Berkualitas dan Ramah  
Lingkungan

Agenda 8: Kestinambungan Pembangunan

#### Transformasi Sosial

1. Kesehatan untuk Semua

2. Pendidikan Berkualitas  
yang Merata

3. Perlindungan Sosial yang  
Adaptif

#### Transformasi Ekonomi

4. Iptek, Inovasi dan  
Produktivitas Ekonomi

5. Penerapan Ekonomi Hijau

6. Transformasi Digital

7. Integrasi Ekonomi  
Domestik dan Global

8. Perkotaan sebagai Pusat  
Pertumbuhan Ekonomi

#### Transformasi Tata Kelola

9. Regulasi yang Adaptif dan  
Taat Asas serta Tata Kelola  
yang Berintegritas, Tangkas  
dan Kolaboaratif

#### Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi

10. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya  
Gentar Kawasan, Keamanan Nasional  
Tangguh, dan Demokrasi Subtansial

11. Stabilitas Ekonomi Makro

12. Ketangguhan Diplomasi

#### Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan

13. Beragama Maslahat dan Berkebudayan  
Maju

14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan  
Gender dan Masyarakat Iknlusif

15. Lingkungan Hidup Berkualitas

16. Berkatahan Energi, Air dan Kemandirian  
Pangan

17. Resiliensi terhadap Bencana dan  
Perubahan Iklim

Wilayah

Sarana dan Prasarana

Kestinambungan  
Pembangunan



# Pentahapan Pembangunan 2025-2045



- Pengalihan subsidi **fosil** ke subsidi ET secara bertahap.
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
- Melanjutkan pembangunan IKN serta pengembangan kota besar dan metropolitan mengacu pembangunan IKN.



- Melanjutkan pembangunan IKN dan daerah mitranya.
- Terwujudnya masyarakat sipil yang partisipatif.
- Akuisisi teknologi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.
- Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk pembangunan superhub IKN.
- Pembangunan kota besar dan metropolitan dengan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi.



- Tewujudnya masyarakat sipil yang mandiri.
- Peningkatan jumlah penerimaan negara dan efektivitas belanja negara.
- Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.
- Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi.
- Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah.



- Perwujudan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi.
- Menjaga ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia
- Tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
- Sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah semakin meningkat.



# Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

| KAWASAN BARAT INDONESIA |      |           |           |           |           |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan             | 5,1  | 5,3-5,5   | 5,8-6,6   | 6,4-7,4   | 5,8-6,6   |
| Kontribusi*             | 78,5 | 76,7      | 75,3      | 73,6      | 71,5      |

| KAWASAN TIMUR INDONESIA |      |           |           |           |           |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan             | 6,1  | 6,8-7,1   | 7,2-8,4   | 8,1-9,8   | 7,3-8,9   |
| Kontribusi*             | 21,5 | 23,3      | 24,7      | 26,4      | 28,5      |

| SUMATERA    |      |           |           |           |           |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan | 4,7  | 4,9-5,2   | 5,4-6,4   | 6,3-7,6   | 5,9-7,2   |
| Kontribusi* | 22,0 | 22,2      | 22,5      | 22,6      | 23,0      |

| KALIMANTAN  |      |           |           |           |           |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan | 4,9  | 5,8-6,1   | 6,4-7,3   | 7,3-9,0   | 7,3-9,2   |
| Kontribusi* | 9,2  | 9,6       | 9,9       | 10,3      | 11,2      |

| MALUKU      |      |           |           |           |           |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan | 14,2 | 11,2-11,6 | 11,4-13,1 | 11,3-13,7 | 8,3-10,1  |
| Kontribusi* | 0,7  | 1,0       | 1,4       | 1,9       | 2,0       |

| JAWA        |      |           |           |           |           |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan | 5,3  | 5,5-5,7   | 5,9-6,7   | 6,5-7,4   | 5,7-6,4   |
| Kontribusi* | 56,5 | 54,5      | 52,8      | 51,0      | 48,5      |

| SULAWESI    |      |           |           |           |           |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan | 7,1  | 7,5-8,0   | 7,6-9,4   | 9,0-11,0  | 7,2-9,0   |
| Kontribusi* | 7,0  | 7,6       | 7,8       | 8,2       | 8,4       |

| PAPUA       |      |           |           |           |           |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan | 7,0  | 6,6-6,9   | 7,0-7,5   | 7,3-8,2   | 6,8-7,9   |
| Kontribusi* | 1,8  | 2,1       | 2,4       | 2,6       | 3,0       |

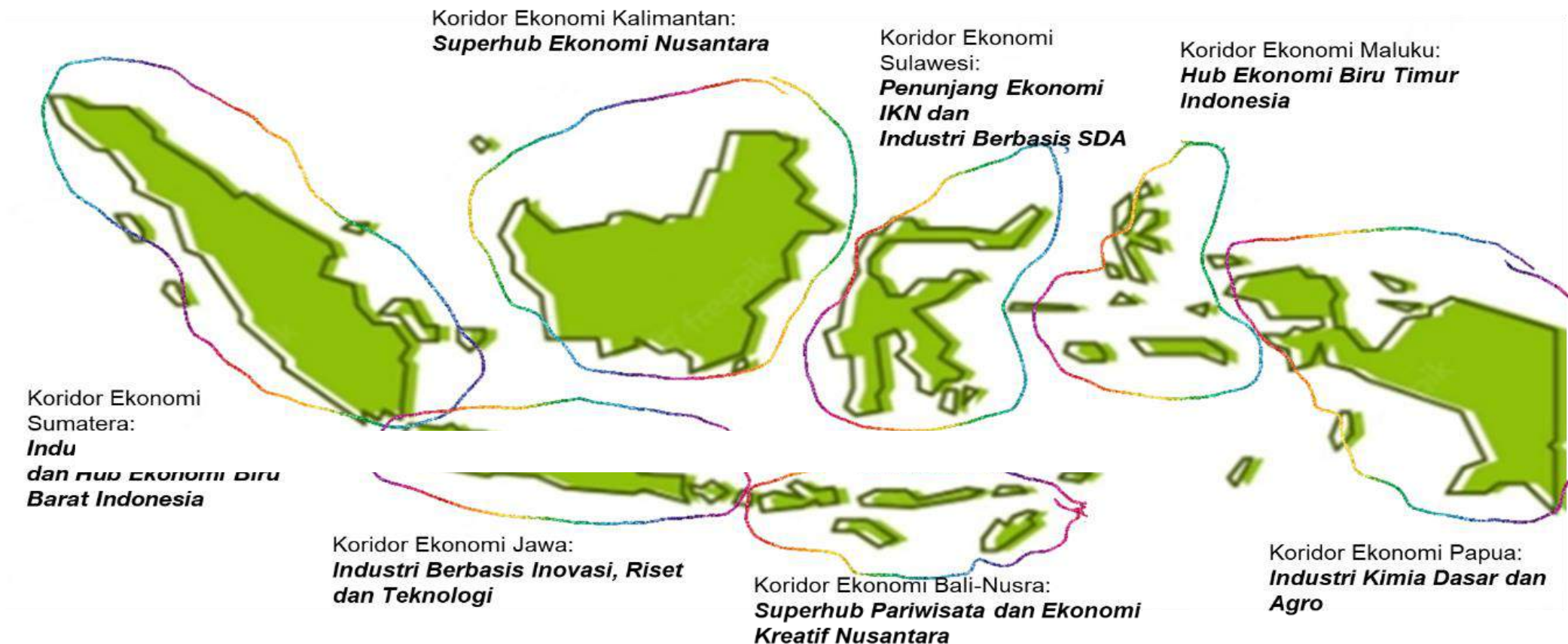
| BALI-NUSA TENGGARA |      |           |           |           |           |
|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 2022 | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035–2039 | 2040–2045 |
| Pertumbuhan        | 5,1  | 6,4-6,8   | 7,1-7,7   | 7,6-8,1   | 7,5-7,9   |
| Kontribusi*        | 2,7  | 3,0       | 3,2       | 3,4       | 3,9       |





# Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

## Tematik Transformasi Ekonomi Berdasarkan Wilayah





# Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

## Tata Ruang dan Pertanahan

1. menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah
2. mewujudkan penataan ruang yang berkualitas
3. mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang

## Reforma Agraria

1. pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset)
2. perbaikan pengelolaan pertanahan

## Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik

1. penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
2. peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial

Fokus lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan/atau industri.  
Fokus wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, terdepan, dan terluar untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan

## Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan

1. menjadikan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dirancang sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan jendela budaya nasional Indonesia
2. pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan



# Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

## Pusat Pertumbuhan

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (a) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; (b) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; (c) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; (d) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

1. pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif
2. percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan
3. penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan
4. penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

## Perdesaan dan Daerah Afirmasi

1. peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan
2. peningkatan mobilitas, konektivitas, dan pemanfaatan teknologi
3. pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis karakteristik wilayah
4. pengelolaan lingkungan perdesaan
5. peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal
6. pengaturan dan penataan desa
7. Pengembangan kawasan perdesaan,
8. Pengembangan kawasan transmigrasi
9. Percepatan pembangunan daerah afirmasi yang meliputi kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar, dan daerah tertinggal





# Rancangan RPJPN 2025-2045: Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan

## Pembangunan Wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara



1. **Pembangunan sumber daya manusia unggul** yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan **peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter**, serta **keterampilan** yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan.
2. **Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan** dengan meningkatkan **interaksi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra** sebagai superhub ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3. **Pembangunan sarana prasarana** untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep **superhub ekonomi** serta meningkatkan **infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP**.
4. **Penguatan tata kelola pemerintahan** untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan.
5. **Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi** sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.



# ***Benchmarking Pembangunan Kota***





# Penataan Ruang Publik di Jepang

*... Tertib, Bersih, Sehat, Aman dan Nyaman...*







# Penataan Ruang Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara







# Pelayanan Dasar Pendidikan di Jepang

## *... Mandiri, Tanggung Jawab dan Tangguh...*







# Pelayanan Dasar Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara







# Pengembangan Seni dan Budaya di Jepang

## ... Atraktif, Partisipatif, dan Inovatif...







# Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara





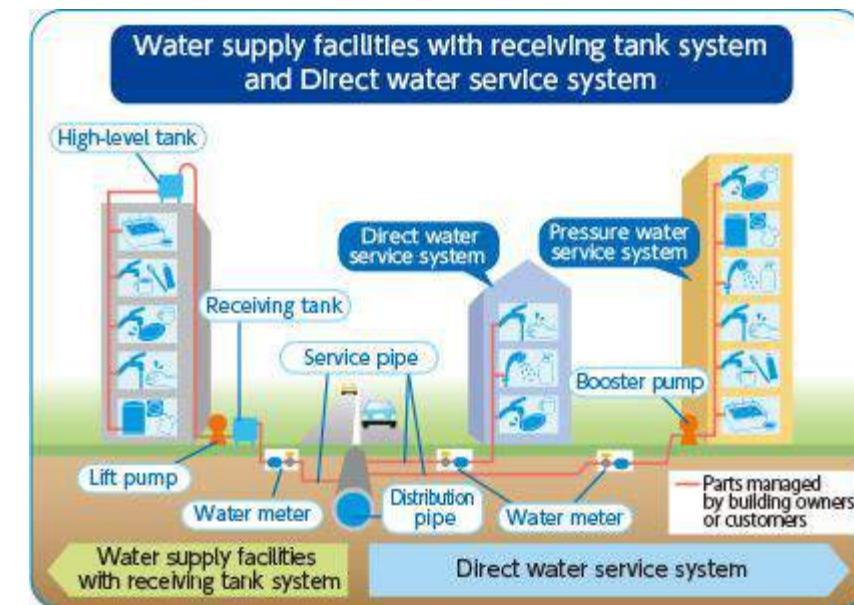
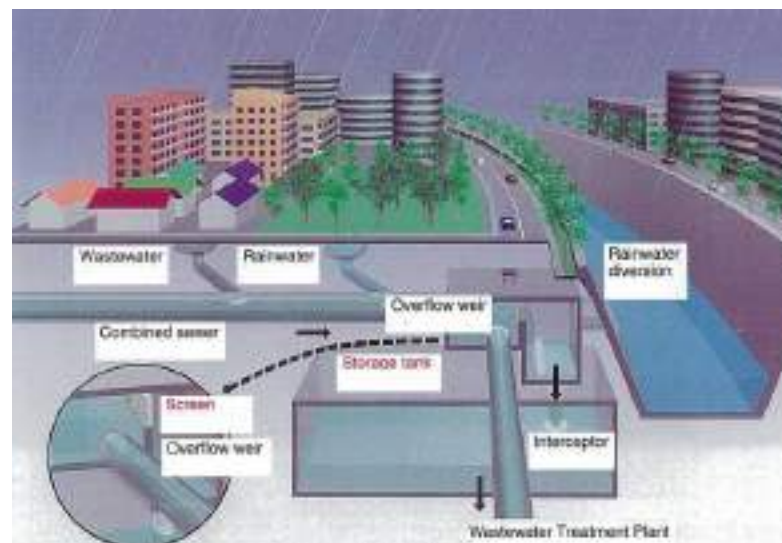
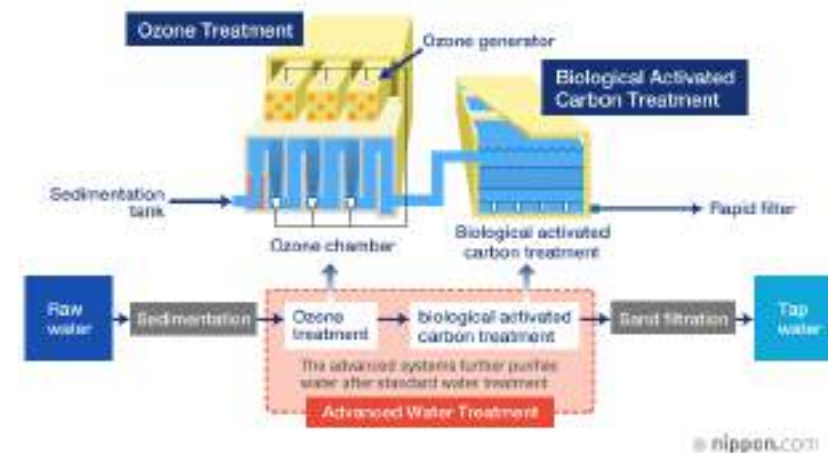


# Pelayanan Dasar Air Bersih di Jepang

## ... Bersih, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan...



Tokyo Waterworks Advanced Treatment System







# Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara







# Pengendalian Banjir di Jepang

## ... Tuntas, Terpadu, Aman, Terjangkau dan Berkelanjutan...







# Pengendalian Banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara







# Pelayanan Dasar Persampahan di Jepang

## ... Bersih, Aman, Tertata, Sirkular dan Berkelanjutan...







# Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara







# Penataan Pusat Perdagangan di Jepang

*... Bersih, Aman, Tertata, Interaktif dan Nyaman...*







# Penataan Pusat Perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara





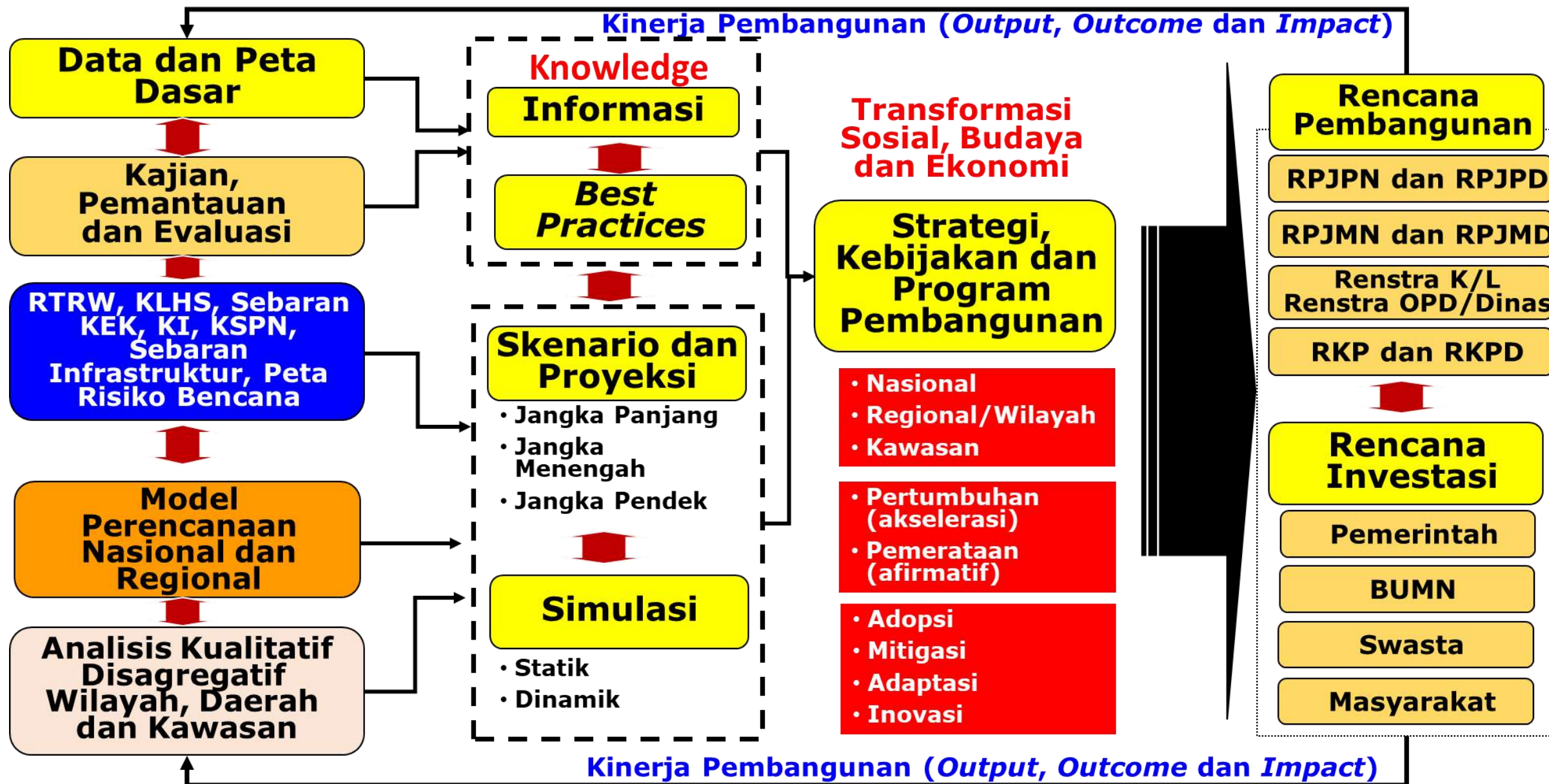


# **Transformasi Daerah: Kesejahteraan Berkelanjutan, Ekonomi Sirkular dan Rantai Nilai**





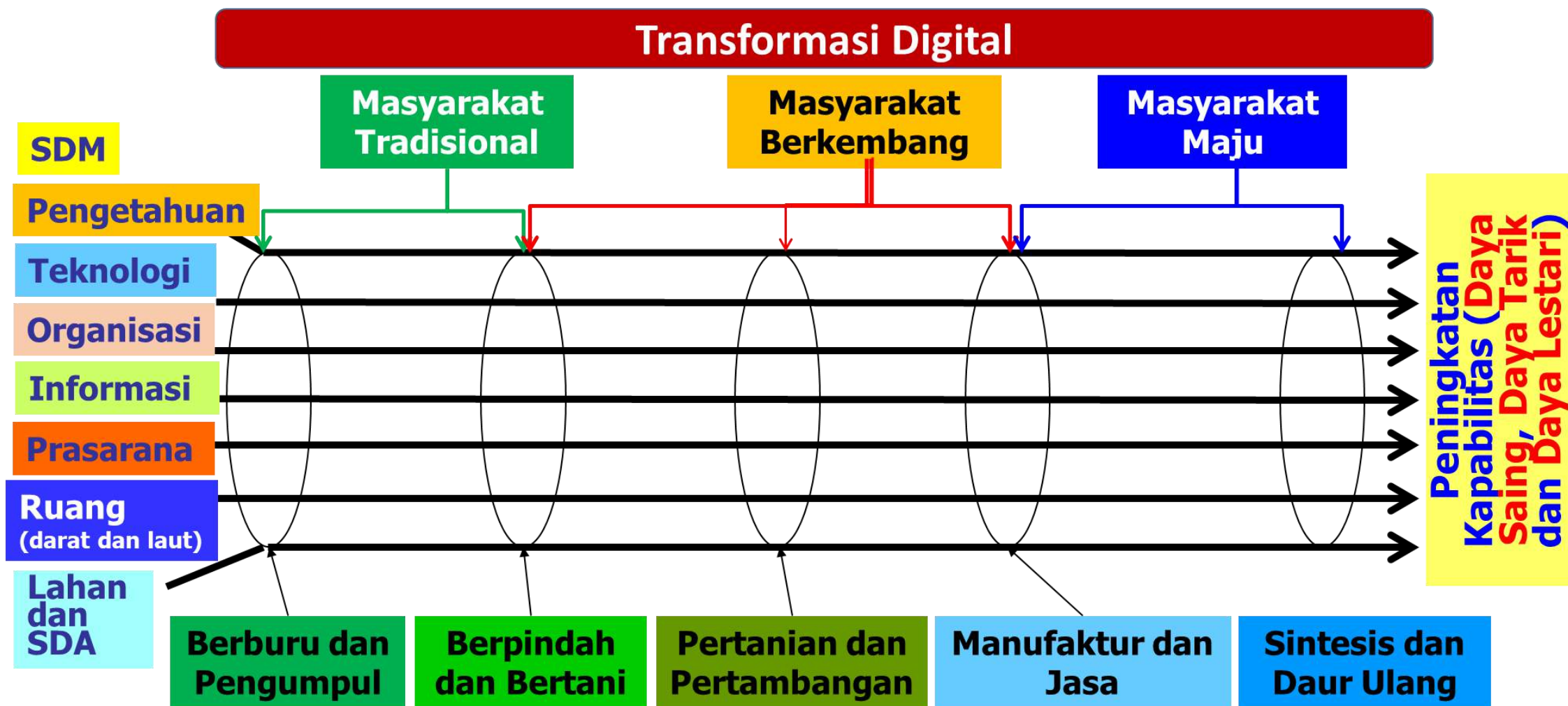
# Perencanaan Berbasis Bukti dan Pengetahuan





# Transformasi Sosial, Budaya dan Ekonomi:

*... Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari....*



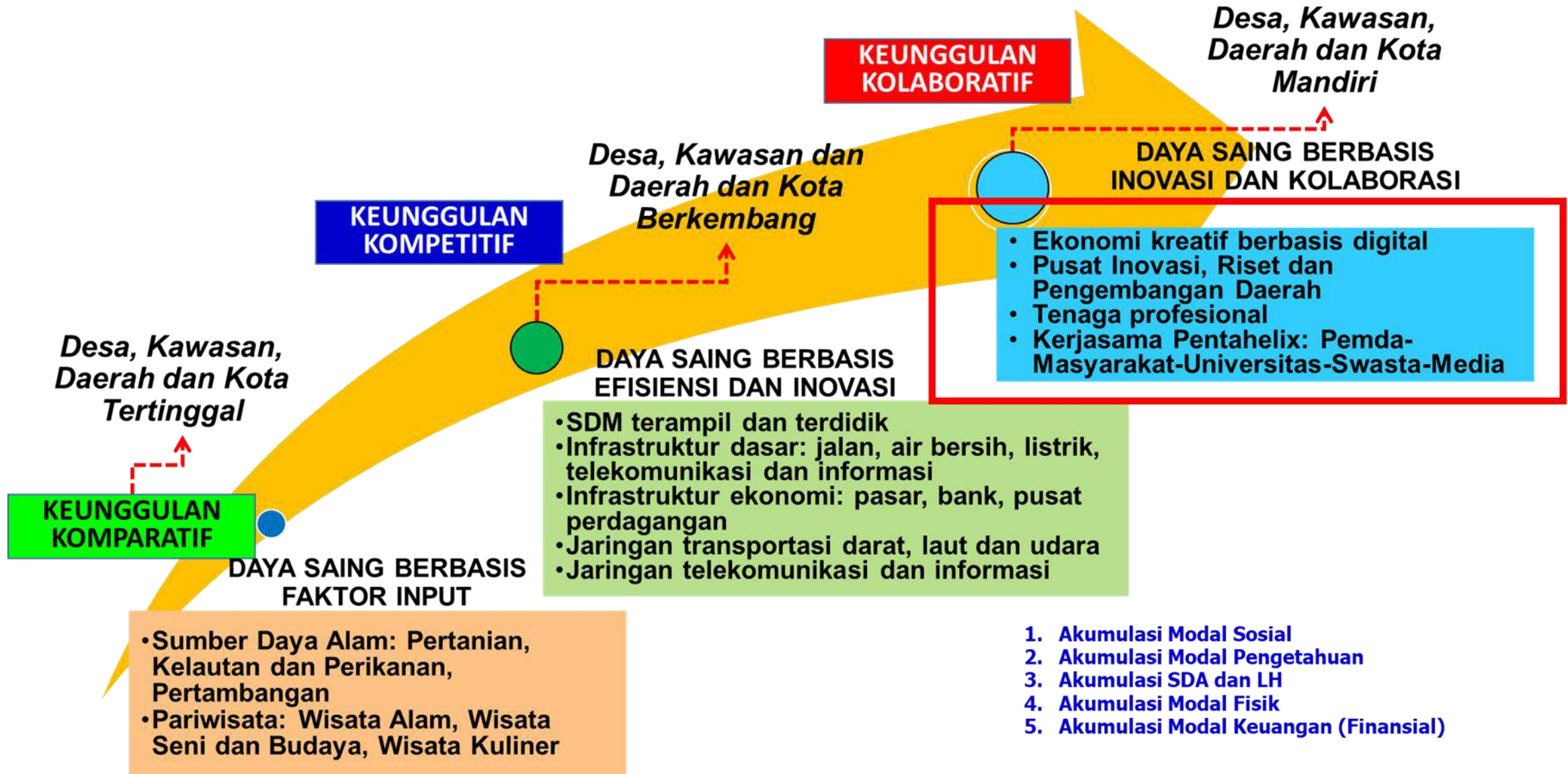
**Kebijakan pembangunan harus mendorong transformasi dan akselerasi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat menjadi produktif, maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat.**





# Transformasi Desa, Daerah, Kota dan Kawasan:

... Keunggulan Komparatif, Kompetitif dan Kolaboratif....





## ***SDGs, Rantai Nilai dan Ekonomi Sirkular***

**PEMBANGUNAN YANG PRODUKTIF, INOVATIF, AMAN,  
BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF**



**Pertumbuhan  
Ekonomi**



**Kesejahteraan  
Masyarakat**



**Kelestarian  
Lingkungan**

**Pembangunan wilayah berbasis pengelolaan sumber daya berkelanjutan, penataan ruang yang terpadu, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, pengembangan pariwisata, infrastruktur konektivitas, dan perluasan kerjasama dan kolaborasi yang adil dan berkelanjutan.**







# Pembangunan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Berkelanjutan (*sustainable livelihood*)

## Modal Manusia

- *Gizi dan kesehatan*
- *Pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian*
- *Etika, moralitas, sikap, dan perilaku*
- *Kesetaraan dan Keadilan Gender*
- *Kapasitas untuk bekerja dan wirausaha*
- *Kapasitas untuk beradaptasi*

## Modal Sosial

- *Jaringan dan relasi*
- *Hubungan saling percaya dan toleransi*
- *Partisipasi*
- *Kepemimpinan lokal*
- *Peraturan bersama dan sanksi*

## Modal Alam

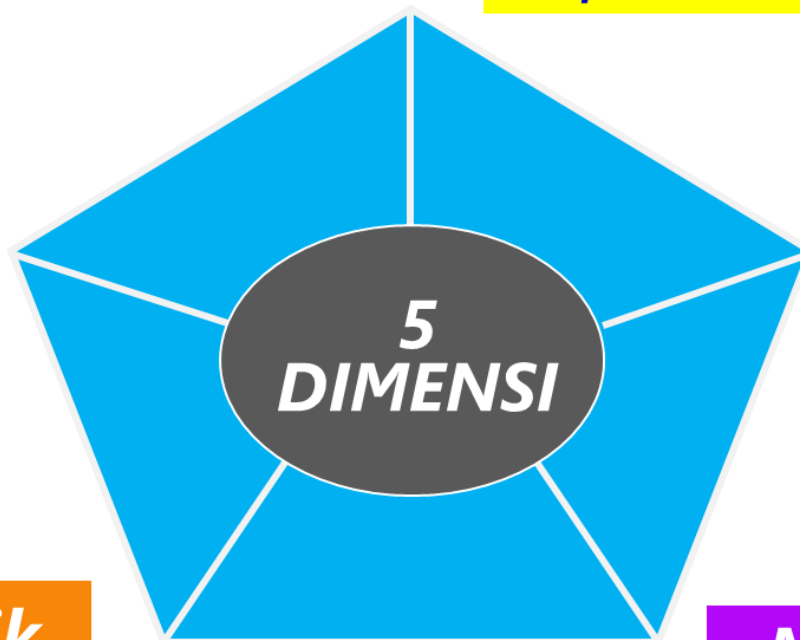
- *Lahan*
- *Sumber daya air dan kelautan*
- *Hutan dan pepohonan*
- *Margasatwa*
- *Keanekaragaman hayati*
- *Jasa lingkungan*

## Modal Fisik

- *Prasarana dasar: rumah, air bersih, listrik dan sanitasi*
- *Konektivitas: transportasi dan telekomunikasi*
- *Peralatan dan Teknologi*

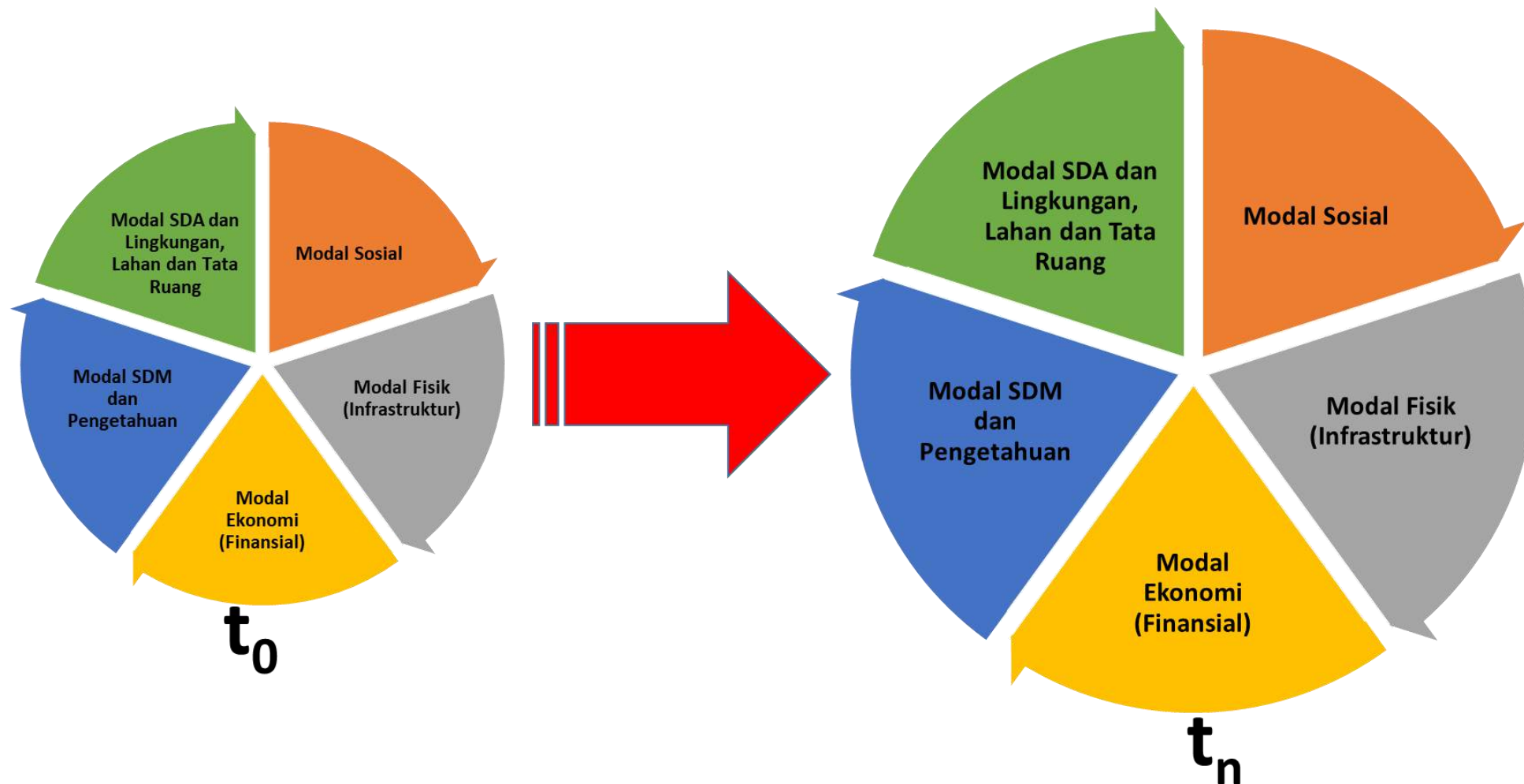
## Modal Ekonomi (finansial)

- *Investasi Pemerintah*
- *Investasi Swasta*
- *Perbankan*
- *Kerjasama Pemerintah Badan Usaha*
- *Pinjaman dan Hibah*





# Pembangunan sebagai Proses Akumulasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

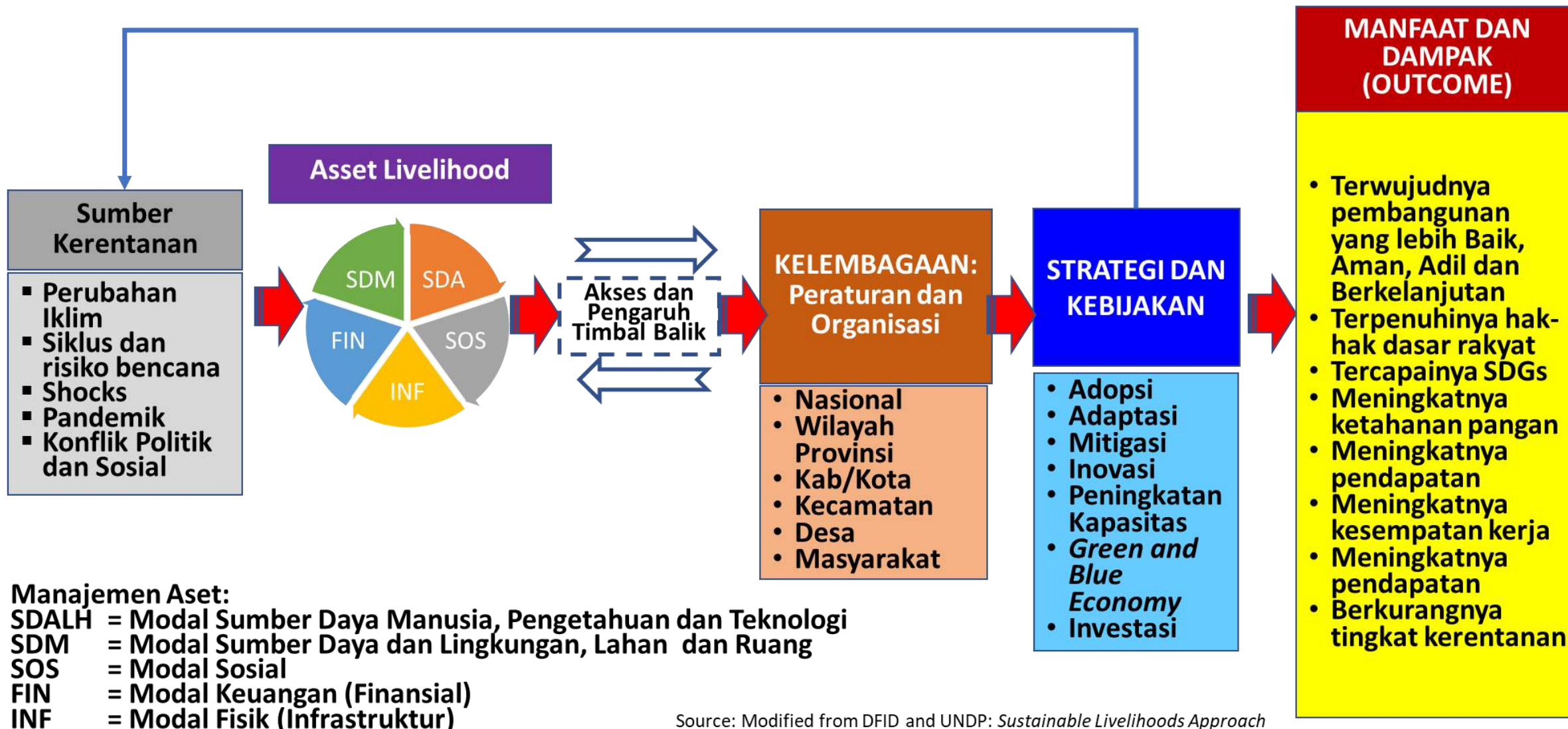


Eksplotasi berlebihan akan meningkatkan akumulasi modal keuangan dan modal fisik, tapi akan merusak modal SDA, Lingkungan, Tata Ruang dan Lahan, dan melemahkan modal sosial.





# Pendekatan Kesejahteraan Berkelanjutan: *Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan*





# Infrastruktur dan Penguatan Rantai Nilai Produksi ...Keterkaitan Produksi-Pengolahan-Distribusi-Logistik-Pasar...



## Komoditas Unggulan:

Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dll  
Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll  
Perikanan: rumput laut, ikan, udang, dll  
Industri: IRT, Industri Pengolahan  
Pertambangan: migas dan non migas

## Tugas dan Peran Bappenas, KL dan Bappeda:

1. Memetakan rantai nilai (value chain) setiap kawasan
2. Menganalisis hambatan (*bottlenecks*) dan penyebabnya
3. Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5. Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhitungkan kerangka regulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.





# Infrastruktur dan Penguatan Rantai Nilai Pariwisata

...Keterkaitan Transportasi-Akomodasi-Destinas-Amenitas-Pasar...

**Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Tabungan dan Investasi**

## Transformasi Digital

1. Satu Data Satu Peta
2. RTRW
3. KLHS
4. Kajian dan Peta Risiko Bencana
5. Kajian Neraca Air
6. Kajian dan Peta Sosial Budaya

### Rencana Wisata

1. Pusat Data, Peta, Informasi dan Pengetahuan (*Knowledge Management*) Pariwisata
2. Pusat Promosi dan Kerjasama

1. **Intermoda**
2. **Angkutan Darat**
3. **Bandara dan Angkutan Udara**
4. **Pelabuhan dan Angkutan Laut**

### Transportasi

1. UMKM dan Koperasi
2. **Swasta**
3. Kemenhub
4. KemenPUPR
5. BUMN
6. BUMD
7. Dinas Pariwisata
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas PU
10. Dinas Perdagangan

1. Hotel dan Motel
2. **Air Bersih**
3. **Listrik**
4. **Internet**
5. Tenaga Terdidik dan Terlatih

### Akomodasi

1. UMKM dan Koperasi
2. **Swasta**
3. Kemenpar
4. Kemen BUMN
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas ESDM
7. Dinas PU
8. Dinas Kominfo

1. Wisata Alama
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Olah Raga

### Destinasi dan Atraksi

1. Pemerintah Desa
2. UMKM dan Koperasi
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata

1. Festival Seni dan Budaya
2. Festival Keagamaan
3. Festival Kuliner
4. Atraksi Wisata
5. Kompetisi Olah Raga

### Amenitas: Kuliner dan Hiburan

1. Pemerintah Desa
2. UMKM dan koperasi
3. Pelaku Usaha
4. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5. Dinas Pertanian
6. Dinas KKP
7. Kemen Dikbud
8. KemenPariwisata

1. Industri Kerajinan, RT, Makanan dan Minuman
2. Pasar dan Pusat Perdagangan (*market Place*)

### Pasar dan Pusat Perbelanjaan

1. UMKM dan Koperasi
2. Pelaku Usaha
3. Dinas Perindag
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perikanan
6. Kemendag
7. Bea Cukai
8. BUMN

**Domestik**

### Transportasi

**Internasional**

**Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Tabungan dan Investasi**

### Pariwisata Unggulan:

1. Wisata Alam
2. Wisata Bahari
3. Wisata Kuliner
4. Wisata Religi
5. Wisata Budaya
6. Wisata Sejarah
7. Wisata Olah Raga

### Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:

1. Memetakan rantai nilai (*value chain*) setiap jenis pariwisata
2. Menganalisis hambatan (*bottlenecks*) dan penyebabnya
3. Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5. Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhitungkan kerangka regulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.

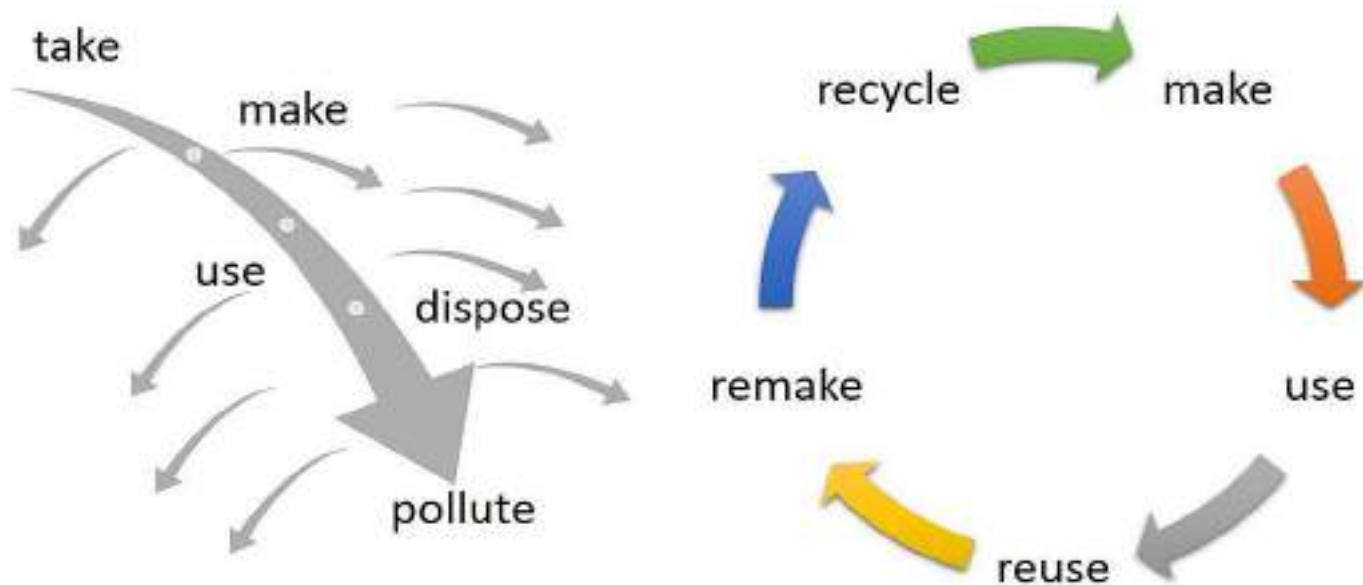


# Pembangunan Berkelanjutan

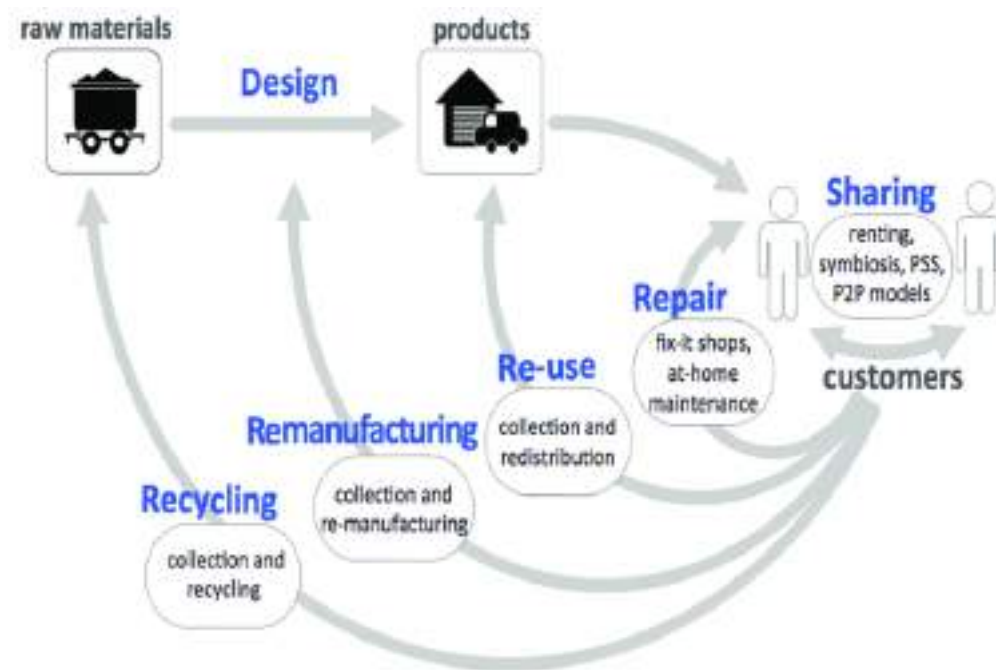
## ...Transformasi Ekonomi Linier menjadi Ekonomi Sirkular ...

Mendorong pembangunan berbasis *circular economy* untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa mengorbankan keberadaan lingkungan hidup sehingga kelestarian alam terjaga dan pembangunan akan berkelanjutan.

**Transformasi dari “*linear economy*”** (sebelah kiri) yang penuh kebocoran dan mengandalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk me-recycle limbah/sampah secara alami...  
**ke arah rantai pasok “*circular economy*”** yang mengoptimalkan pemakaian ulang dan daur ulang berbasis inovasi dan teknologi.



CC 3.0 Catherine Weetman 2016

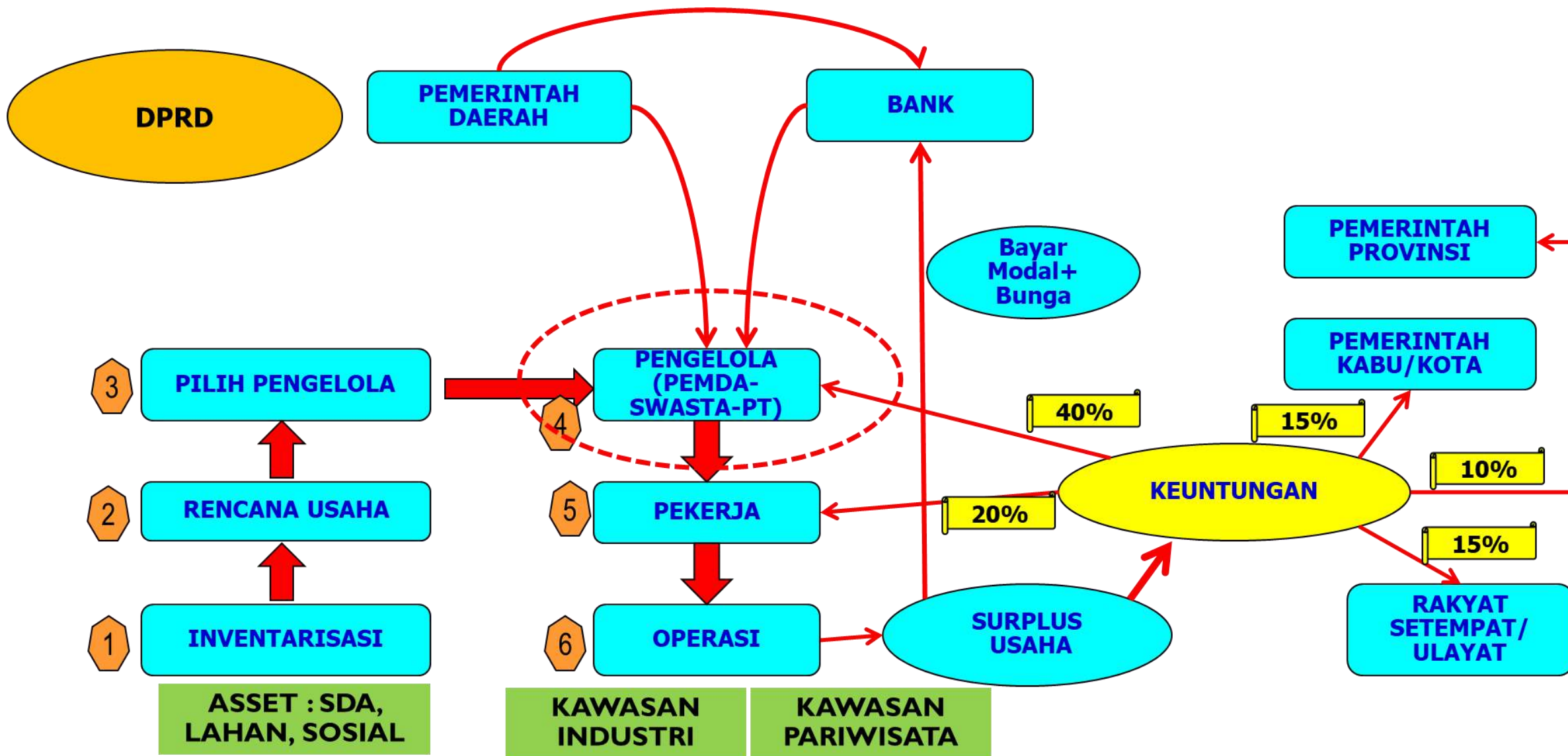


Konsep “*circular economy*” harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi hijau berbasis industri pengolahan dengan menjaga daya dukung lingkungan dan daya tampung wilayah.





# Pengembangan Kawasan Berbasis Kemitraan (People-Public-Private Partnership)





# Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara





# Visi dan Tujuan Pembangunan IKN

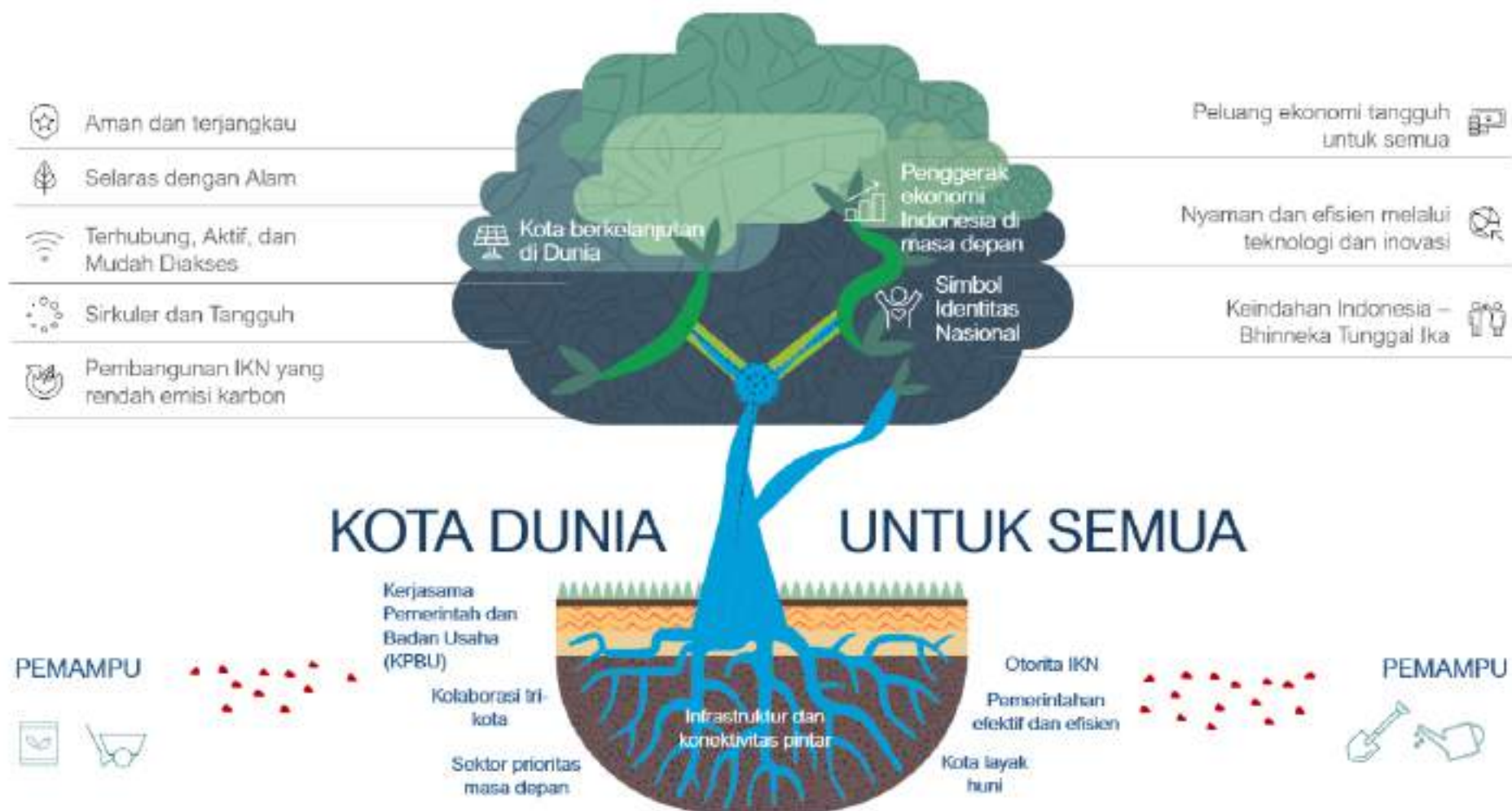
## Visi dan Tujuan Pembangunan IKN

**‘Kota Dunia untuk Semua’** dengan tujuan untuk membangun:

- Simbol identitas nasional
- Kota berkelanjutan di dunia
- Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan

## Agenda global dan nasional sebagai pertimbangan Visi IKN

- Visi Indonesia 2045;
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Agenda Baru Kota;
- Kebijakan Perkotaan Nasional 2045.





# Tahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN



**Tahapan pembangunan** dibagi menjadi 5 tahap:

- Tahap 1 (2022-2024)
- Tahap 2 (2025-2029)
- Tahap 3 (2030-2034)
- Tahap 4 (2035-2039)
- Tahap 5 (2040-2045)



Fokus dalam **penahapan pembangunan** meliputi:

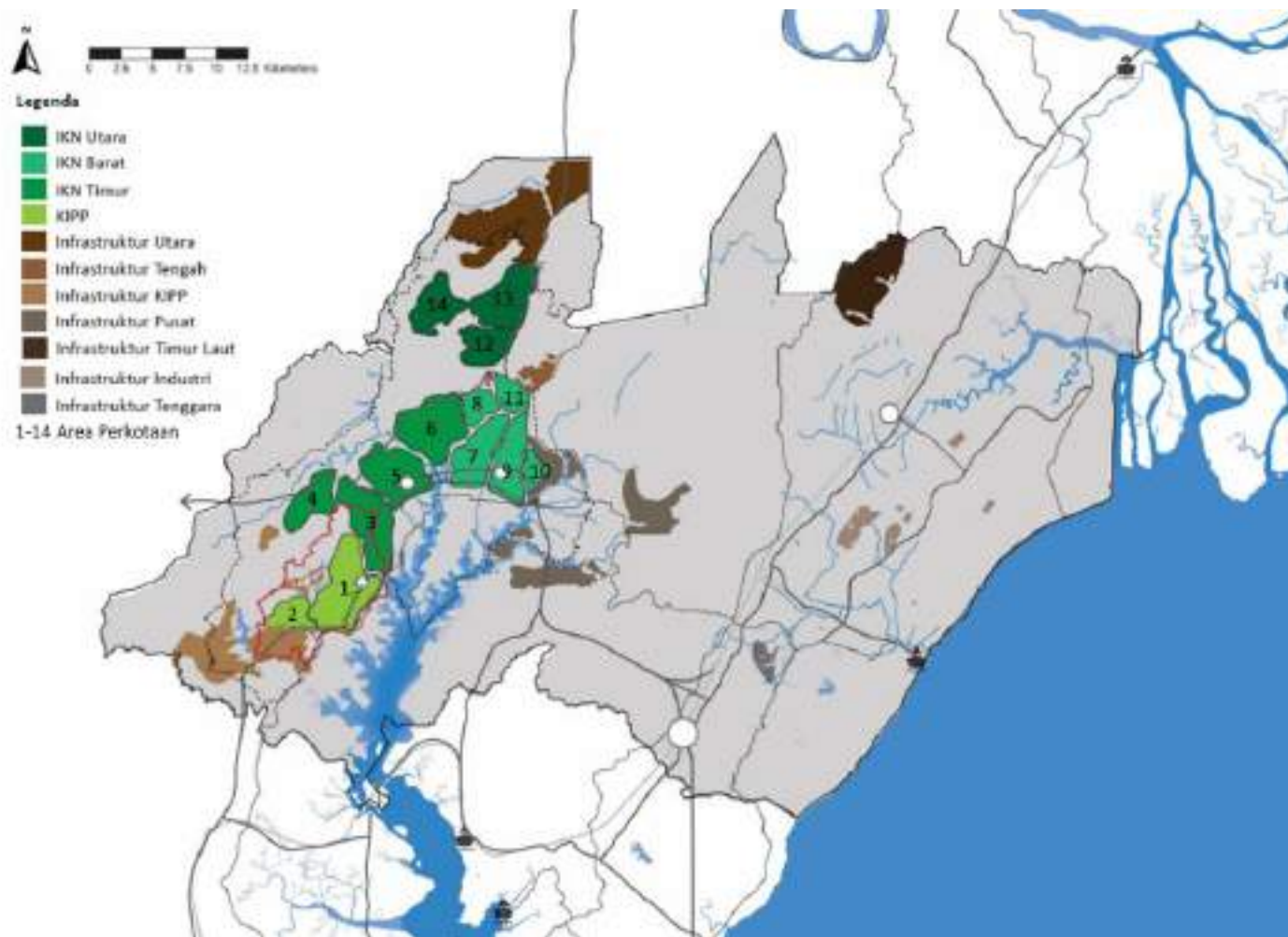
- Tahap Persiapan
- Tahap pembangunan
  1. Pembangunan Sosial
  2. Pembangunan infrastruktur dan lingkungan
  3. Pembangunan industri dan pusat ekonomi
  4. Pembangunan pertahanan dan keamanan
  5. Pemindahan ASN, TNI/Polri, PNA/OI



Penahapan ini juga menjelaskan perwujudan pemanfaatan ruang yang mengindikasikan **pengembangan Kawasan** mulai dari KIPP, Kawasan IKN Timur, Kawasan IKN Barat, hingga Kawasan IKN Utara.



**Pengembangan Industri dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi** untuk 6 klaster dan 2 pemampu (*enabler*)












# Rincian Tahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN

| ASPEK                                    | TAHAP 1<br>(2022-2024)   | TAHAP 2<br>(2024-2029)  | TAHAP 3<br>(2030-2034)  | TAHAP 4<br>(2035-2039)  | TAHAP 5<br>(2040-2045)  |
|--|--|---|---|---|---|
| Persiapan                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan kelembagaan otorita</li><li>• Pengadaan tanah</li><li>• Sosialisasi pihak terkait</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan tanah</li><li>• Sosialisasi pihak terkait</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan tanah</li><li>• Sosialisasi pihak terkait</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan tanah</li><li>• Sosialisasi pihak terkait</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengadaan tanah</li><li>• Sosialisasi pihak terkait</li></ul>                 |
| Pembangunan Sosial                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelesaian masalah tumpang tindih kepemilikan lahan; pembangunan fasilitas umum, pelibatan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, pengembangan kapasitas masyarakat lokal dan peluang ekonomi bagi kelompok rentan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan; dan</li><li>• Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan lokal untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal &amp; pengembangan lembaga pendidikan dan riset kelas dunia.</li></ul> |   |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, pengembangan IKN yang sesuai rencana tata ruang, pengembangan kebijakan ekonomi hijau dan berkelanjutan;</li><li>• Peningkatan kapasitas dan daya saing lembaga pendidikan dan riset kelas dunia.</li></ul> |   |
| Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Infrastruktur transportasi, persampahan, air minum, drainase, TIK, listrik, fasum-fasos, perumahan</li><li>• Konservasi hutan &amp; satwa</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Perluasan infrastruktur mobilitas (tol, bandara, dll)</li><li>• Pusat data terpadu</li><li>• Penambahan amenities kota</li><li>• Program kota hutan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem transit dan angkutan umum basis jalan dan rel</li><li>• Penambahan amenities digital</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• KA trans Kalimantan dan KA perkotaan</li><li>• Kajian bendungan multiguna</li></ul>   | Penyediaan fasilitas infrastruktur dan transportasi telah mencapai tahap akhir  |
| Pembangunan industri dan pusat ekonomi   | Berpusat pada upaya untuk memikat pelaku industri pelopor ( <i>anchor tenant</i> ) dan SDM   | Pengembangan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu   | Peningkatan investasi, kapasitas, diversifikasi, dan penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu                                       | Peningkatan kapasitas, diversifikasi, penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu  | Penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu  |
| Pembangunan pertahanan dan keamanan      | pemenuhan 15-20% pembangunan simbol dan sistem hankam di KIPP dan sebagian KIKN/wilayah IKN secara penuh   | Pengembangan sistem pertahanan & sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)   | Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)   | Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)   | Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas (infrastruktur dan peralatan)                               |
| Pemindahan ASN, TNI, Polri, PNA, dan OI  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemindahan ASN (sudah termasuk TNI/Polri)</li><li>• Persiapan transisi PNA/OI</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemindahan ASN</li><li>• Pemindahan TNI/Polri</li><li>• Transisi pelayanan PNA/OI</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemindahan ASN selesai</li><li>• Pemindahan TNI/Polri</li><li>• Pelayanan PNA/OI beroperasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemindahan TNI/Polri</li><li>• Digitalisasi dan integrasi pelayanan PNA/OI</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemindahan TNI/Polri</li><li>• Optimalisasi pelayanan publik PNA/OI</li></ul> |



# Prinsip dan Indikator Kinerja IKN

| 1. Selaras Dengan Alam   | 2. Bhinneka Tunggal Ika   | 3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses   | 4. Rendah Emisi Karbon   | 5. Sirkuler dan Tangguh  | 6. Aman dan Terjangkau   | 7. Nyaman dan Efisien melalui Teknologi   | 8. Peluang Ekonomi untuk Semua   |
|--|---|---|--|--|--|---|--|
|   |    |    |   |   |   |    |   |
| <p><b>1.1</b> <b>&gt;75%</b> dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi makanan)</p> <p><b>1.2</b> <b>100%</b> penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit</p> <p><b>1.3</b> <b>100%</b> penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian</p> | <p><b>2.1</b> <b>100%</b> integrasi seluruh penduduk</p> <p><b>2.2</b> <b>100%</b> warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit</p> <p><b>2.3</b> <b>100%</b> ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif</p> | <p><b>3.1</b> <b>80%</b> perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif</p> <p><b>3.2</b> <b>10 menit</b> ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik</p> <p><b>3.3</b> <b>&lt;50 menit</b> Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030</p> | <p><b>4.1</b> Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi <b>100%</b> kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara</p> <p><b>4.2</b> <b>60%</b> penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung</p> <p><b>4.3</b> <b>Net zero emission</b> untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha</p> | <p><b>5.1</b> <b>&gt;10%</b> dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan</p> <p><b>5.2</b> <b>60%</b> daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045</p> <p><b>5.3</b> <b>100%</b> air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035</p> | <p><b>6.1</b> <b>Ranking 10 besar kota paling layak huni</b> di dunia pada tahun 2045</p> <p><b>6.2</b> Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha <b>memiliki akses terhadap infrastruktur penting</b> di 2045</p> <p><b>6.3</b> Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang <b>memenuhi rasio hunian berimbang</b>.</p> | <p><b>7.1</b> Mewujudkan peringkat <b>sangat tinggi</b> dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB</p> <p><b>7.2</b> <b>100%</b> konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis</p> <p><b>7.3</b> <b>&gt;75%</b> kepuasan dunia usaha atas layanan digital</p> | <p><b>8.1</b> <b>0%</b> kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035</p> <p><b>8.2</b> <b>Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita</b> setara ekonomi berpendapatan tinggi</p> <p><b>8.3</b> <b>Rasio Gini</b> regional terendah di Indonesia di 2045</p> |





# Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan IKN

## Forest City/Kota Hutan IKN

Kota yang didominasi bentang lanskap berstruktur hutan/RTH, dengan pendekatan lanskap terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam

PRINSIP

Nol  
deforestasi

Konservasi  
keanekaraga  
man hayati

Pengelolaan  
hutan  
berkelanjutan

Peningkatan  
stok karbon

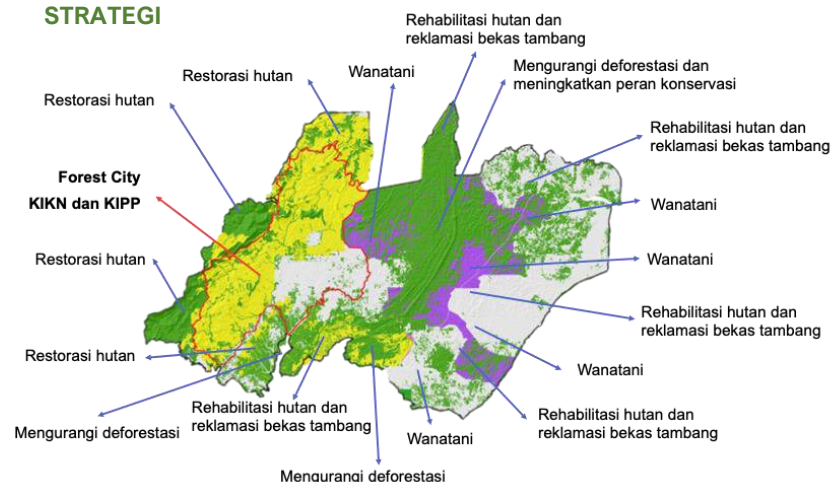
Pelibatan  
masyarakat  
Adat & lokal

Perbaikan tata  
kelola & tata  
guna lahan

**75%** Kawasan hijau **Wilayah IKN (65% hutan & 10% tutupan hijau)**

**50%** kawasan hijau **KIKN & KIPP**

## STRATEGI



## Sponge City/Kota Spons IKN

- Sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan
- Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer



### Kota Nusantara (Archipelago City)

Ruang terbuka hijau & biru menjadi fondasi struktur pembentuk kota. Kedua ruang tersebut menghubungkan kota dengan alam, terintegrasi dengan desain kota untuk melestarikan keanekaragaman hayati.



### Kota Berdaya Serap (Absorbent City)

Ruang terbuka hijau & biru pada skala kecamatan akan menangkap limpasan hujan yang dialirkan ke taman kota, sehingga akuifer terisi kembali & siklus air terjaga.



### Kota Terintegrasi (Integrated City)

Elemen di skala kelurahan diintegrasikan untuk memperlambat & menahan aliran air, memanen air hujan, & meningkatkan penyerapan air hujan ke tanah.

## Smart City/Kota Cerdas IKN

Komponen kota cerdas mengidentifikasi elemen nilai tambah yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi & komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan.

## 6 Kategori inisiatif kota cerdas IKN





# Ibu Kota Nusantara mendorong percepatan pertumbuhan melalui 6 Klaster Ekonomi dan 2 Klaster Pendukung

## 6 Klaster Ekonomi



### Industri Teknologi Bersih

*Greenfield* baru untuk mobilitas dan utilitas yang lebih bersih



### Farmasi Terintegrasi

Hub manufaktur farmasi terbaik untuk produk API *generic* serta biosimilar bernilai tinggi



### Industri pertanian berkelanjutan

Industri pertanian nabati dan inovasi pangan untuk masa depan yang berkelanjutan dan resilien



### Ekowisata dan pariwisata kebugaran

Ekowisata yang menyeimbangkan nilai ekonomi, lingkungan, dan sosial secara beragam dan inklusif



### Bahan kimia dan produk kimia

Pengembangan sektor eksisting yang terintegrasi untuk menyediakan bahan baku industri masa depan



### Energi rendah karbon

Transformasi sektor energi konvensional dengan melibatkan teknologi berkelanjutan dan inovasi dekarbonisasi

## 2 Klaster Pendukung



### *Smart city* dan pusat industri 4.0

Kota yang terhubung untuk layak huni dan siap menghadapi masa depan



### Pendidikan Abad 21

Klaster pendidikan berbasis keterampilan abad ke-21 untuk memperkuat sektor pendidikan menuju kesempatan kerja

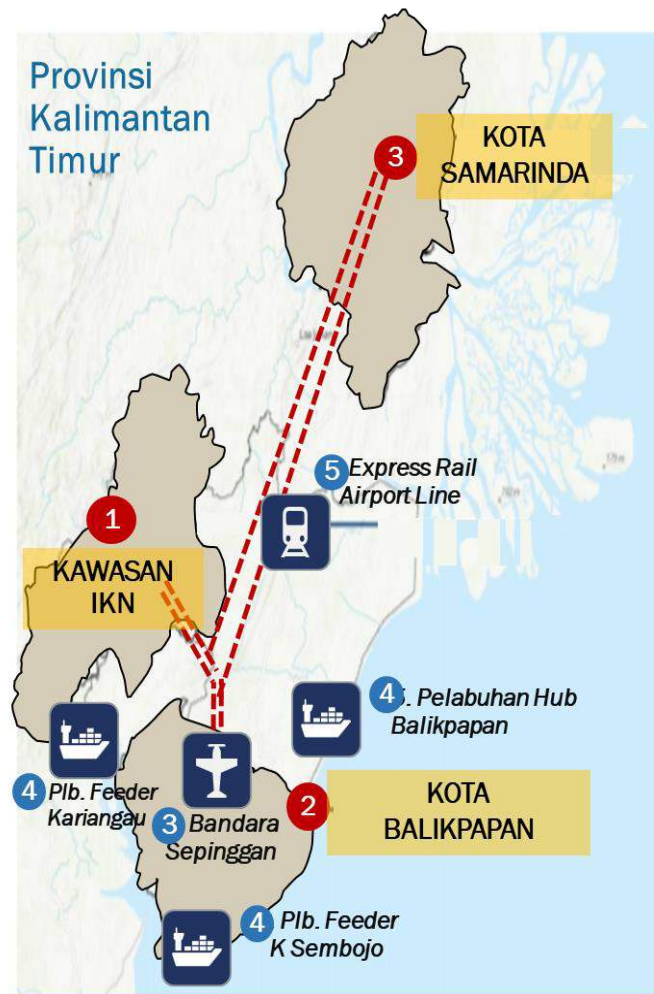




# Pengembangan IKN sebagai Superhub

**Superhub Ibu Kota Negara (IKN):** Ibu Kota Negara adalah Superhub dengan **ekonomi kluster berbasis jasa** pemerintahan, yang menghubungkan tiga klaster ekonomi dengan hub bandara dan hub Pelabuhan.

## Kawasan Ibu Kota Negara dan Kota Penyangga



## Ketiga Pilar Ekonomi Superhub : Integrasi Tiga Kota

### Tiga Economic Hub

1



#### Kawasan Pemerintahan & Industri Berbasis Inovasi

Pembangunan bangunan fungsi utama pemerintahan (gedung eksekutif, legislatif, yudikatif) serta kawasan industri berbasis inovasi (*low carbon tech*, farmasi dan *agro-industry*)

2



#### Kota Samarinda

Pembangunan Samarinda sebagai pusat pertambangan berkelanjutan, energi terbarukan, dan pariwisata (ekowisata, wisata kebugaran dan bisnis)

3



#### Kota Balikpapan

Pembangunan Balikpapan sebagai pusat industri petrokimia, logistik dan pariwisata (ekowisata, wisata kebugaran dan bisnis)

### Connectivity Backbone : Airport and Intra-city

3



#### Bandara Balikpapan

Titik penghubung wilayah IKN dengan provinsi atau pulau lain di Indonesia dan konektivitas (*gateway*) dengan negara luar.

4



#### Pelabuhan Balikpapan

Pengembangan Pelabuhan Balikpapan sebagai hub, didukung dengan pengembangan pelabuhan *feeder*/pengumpulan seperti Kariangau dan K.Sembojo

5



#### Express Rail Airport Line

Pembangunan konektivitas kereta ekspres yang menghubungkan IKN dengan dua kota penyangganya



# Keterkaitan Antarwilayah IKN dan Daerah Mitra



1. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.
2. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan wilayah Kalimantan secara keseluruhan.
3. Keterkaitan wilayah antara IKN dengan wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Sumatera.
4. Keterkaitan Wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Sumatera.

IKN bertumbuh melalui kolaborasi dan sinergi dengan kawasan, kota, maupun daerah mitra sekitar yang telah berkembang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, seperti sistem perkotaan di sepanjang koridor pantai timur Pulau Kalimantan dan pantai barat Sulawesi.

1. **Logistik dan Konektivitas:** dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut, serta pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah IKN.
2. **Sumber daya manusia dan ketenagakerjaan:** SDM terampil dan unggul untuk kawasan IKN perlu ditunjang pengembangan tenaga kerja dari kabupaten/kota sekitar.
3. **Perdagangan, Jasa, dan Industri:** IKN berpotensi melakukan pengembangan dan diversifikasi industri dengan permintaan tinggi dan membuka lapangan kerja dengan keterampilan menengah-tinggi bagi SDM industri dan masyarakat luas.
4. **Pariwisata dan ekonomi kreatif:** kolaborasi dengan kabupaten/kota sekitar serta badan usaha/swasta dalam hal pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif.
5. **Ketahanan Pangan:** pemenuhan akses pangan di IKN ditunjang dengan keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi dengan area-area perkotaan dalam wilayah IKN dengan kabupaten/kota sekitar.
6. **Energi:** potensi transformasi industri minyak dan gas bumi (migas) serta batubara menuju energi rendah karbon di daerah mitra IKN.
7. **Keberlanjutan lingkungan:** ekosistem sekitar sebagai aspek pendukung vital keberlanjutan IKN.





# Persiapan dan Kesiapan Pemerintah Daerah

## Bidang

### Tata Ruang dan Pertanahan

### Pengembangan Wilayah dan Kawasan

### Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

### Infrastruktur

### Tata Kelola dan Pengorganisasian

### Pengembangan Ekonomi

### Aparatur (ASN, TNI dan POLRI)

### Sosial, Budaya dan Kependudukan

### Pertahanan dan Keamanan

### Pembiayaan

## Ruang Lingkup

- Penyiapan RTRW dan RDTR
- Penyiapan Lahan (*clean and clear*)

- Penyiapan Rencana Induk
- Penyiapan *Urban Design*

- Penyiapan KLHS
- Penyiapan Kajian Risiko Bencana

- Penyiapan Infrastruktur Dasar
- Penyiapan Jaringan Transportasi
- Penyiapan Perumahan dan Permukiman

- Penyiapan Kerjasama dengan OIKN
- Penyiapan Tata Kelola

- Penyiapan Prioritas Sektor
- Penyiapan *Superhub*

- Penyiapan Optimalisasi ASN Pemda
- Pengembangan Kapasitas

- Penyiapan Kajian Dampak Sosial
- Penyiapan SDM Lokal

- Penataan Ketertiban
- Penataan Keamanan

- Penyiapan Rencana Investasi
- Penyiapan Sumber Pembiayaan

## Kegiatan dan Output

- Revisi RTRW dan RDTR
- Pembebasan Lahan (*clean and clear*)
- Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria

- Penyiapan Masukan Pemda thd Rencana Induk
- Penyiapan Kawasan Kecamatan Lokasi IKN
- Penyiapan Kawasan Bisnis Pendukung IKN

- Penyiapan KLHS Kabupaten/Kota
- Penyiapan Kajian dan Peta Risiko Bencana
- Penyiapan Ketangguhan dan Ketahanan Bencana

- Pembangunan Infrastruktur Dasar
- Pembangunan Jaringan Transportasi
- Pembangunan Perumahan dan Permukiman

- Penegasan Pembagian Tugas dan Peran Pemda
- Pola Kerja Pemda dan Badan Pengelola
- Pola Alokasi DAU, DAK dan Bagi Hasil yang Adil

- Pengembangan Industri Unggulan
- Pengembangan Jasa Unggulan
- Penguatan Rantai Nilai Ekonomi

- Optimalisasi ASN Pemda dalam Pelayanan IKN
- Peningkatan Kapasitas ASN Pemda
- Penyiapan Tunjangan dan Insentif

- Perluasan Kesempatan Penduduk
- Peningkatan Keterampilan Penduduk
- Pengembangan Manajemen Konflik Sosial

- Penjaminan Perlindungan Penduduk
- Penyiapan Skema Kerjasama TNI/Polri dan Pemda

- Penghitungan Rencana Investasi
- Pengembangan Skema KPBU
- Pengembangan Skema Lain seperti CSR



## Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan dan Pengembangan



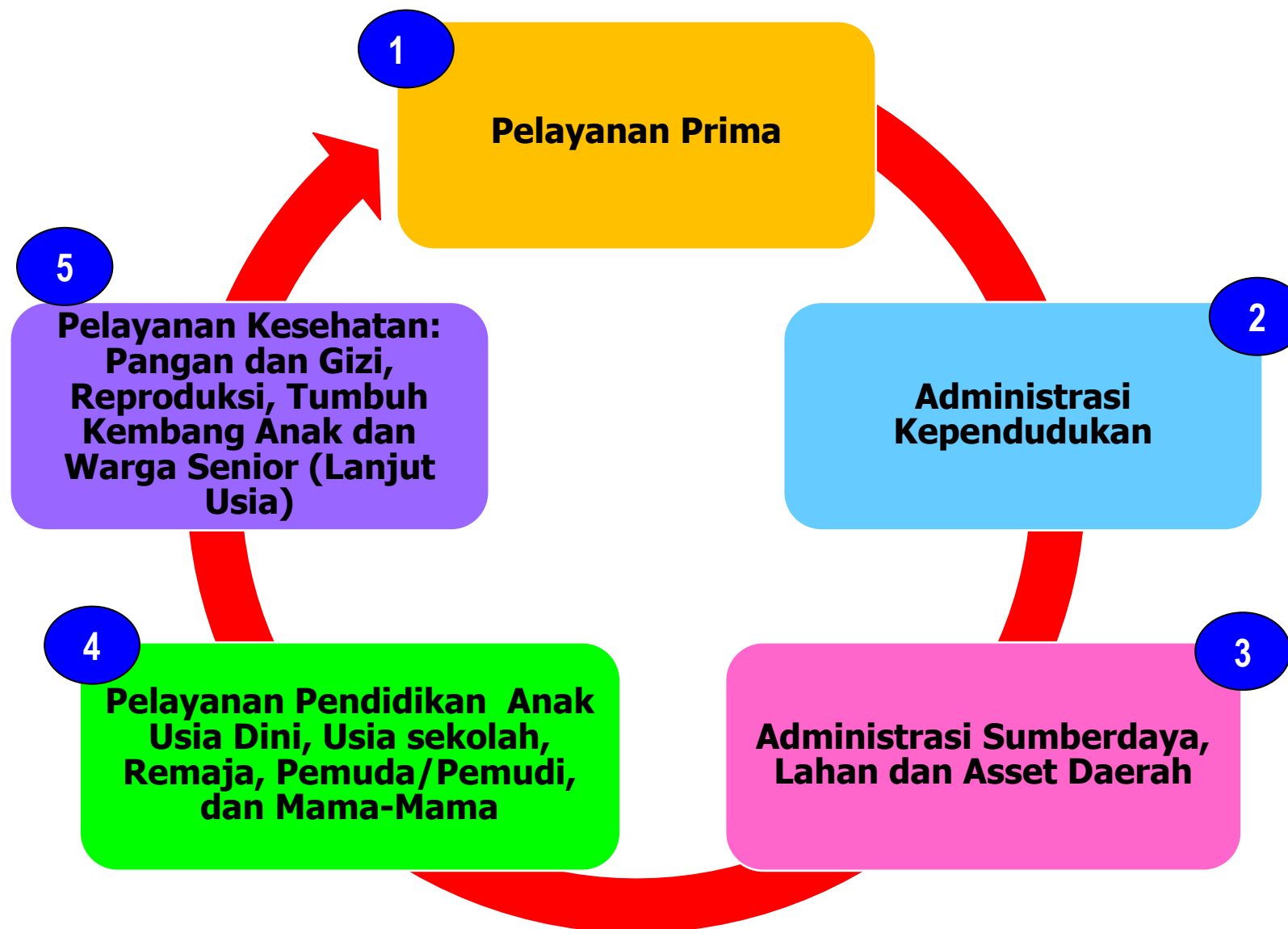


# Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan





# Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Pelayanan Dasar







# Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Pemberdayaan Masyarakat





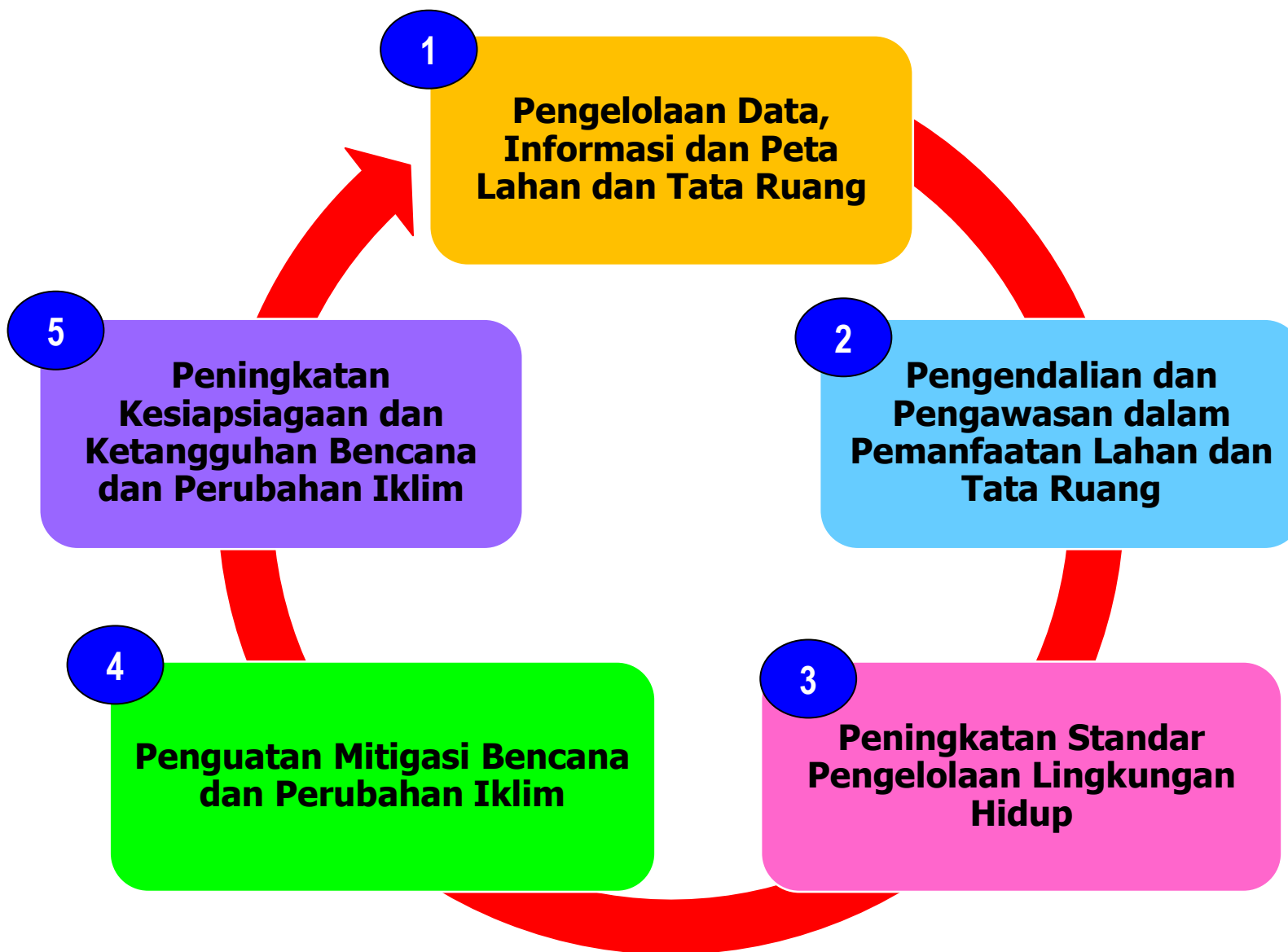
# Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Inovasi dan Kewirausahaan







# Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar Pusat Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan





# Pengembangan Kecamatan Kabupaten Kukar

## Pusat Pengembangan Kawasan Strategis







# Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah



# Sinkronisasi dan Konsistensi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi, dan Audit

## Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Bappenas
- Kemenko
- K/L
- Kemendagri
- Pemda

1

- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L
- Kemenko
- Kemendagri
- DPR dan DPD

2

LKPP

3

- K/L
- Pemda

4

- Kemendagri
- Kemenkeu
- Bappenas
- Kemenpan
- KSP

5

BPKP  
BPK

6

PERENCANAAN

OUTPUT

INPUT

PENGANGGARAN

OUTPUT

INPUT

PENGADAAN

OUTPUT

INPUT

PELAKSANAAN

OUTPUT

INPUT

PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI

OUTPUT

INPUT

AUDIT

OUTPUT

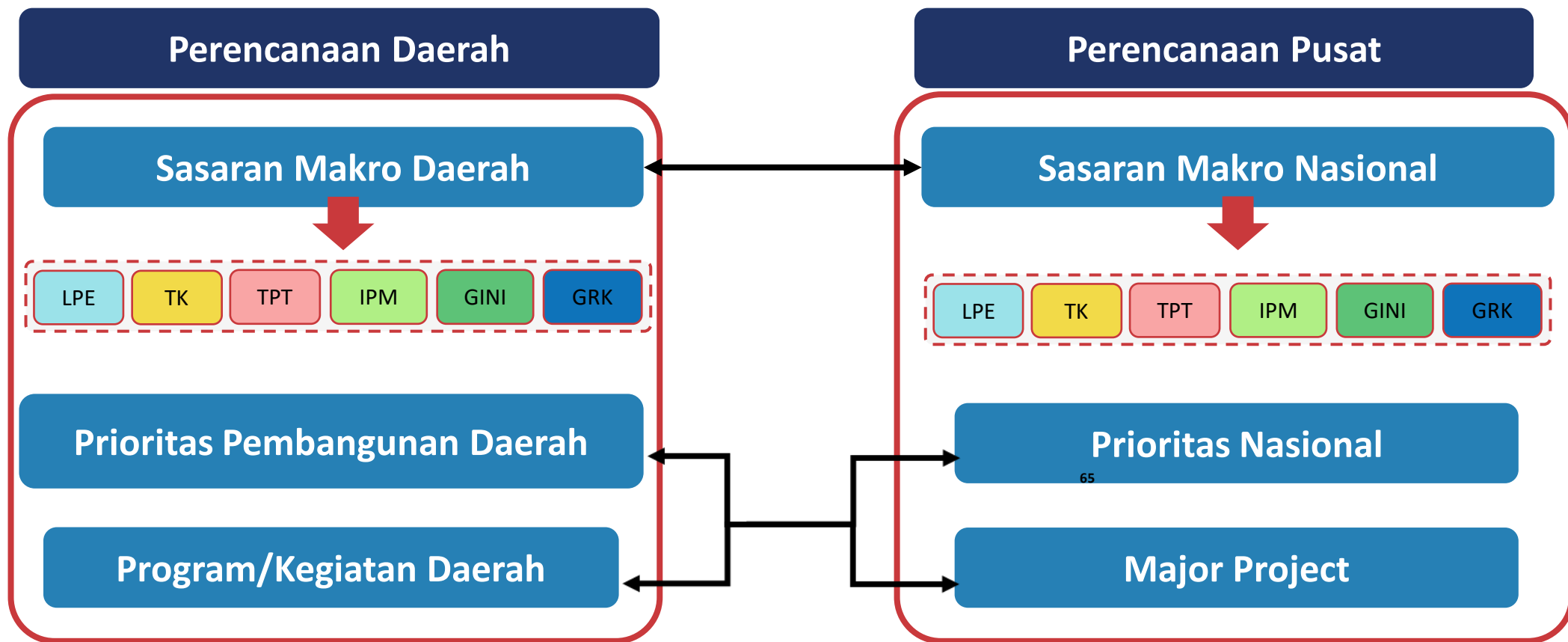
INPUT

1. Keterkaitan #1: RPJM vs Renstra, RKP vs Renja, Renja vs RKA, RKP vs RAPBN, RKPD vs RAPBD, RAPBD vs RAPBN
  2. Keterkaitan #2: Kebutuhan Riil, Standar Biaya dan Standar Harga
  3. Keterkaitan #3: Tertutup vs Terbuka Lelang Manual vs *E-Procurement*
  4. Keterkaitan #4: Kesiapan Perencanaan vs Keterlambatan dan Kapasitas Pelaksanaan
  5. Keterkaitan #5: Pengendalian Parsial vs Terpadu, Internal vs Eksternal (Independen)
  6. Keterkaitan #6: Audit Keuangan vs Audit Kinerja Audit Administrasi vs Audit Subtansi
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE: (*fragmented*) sub sistem vs Terpadu (*integrated*))





# Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

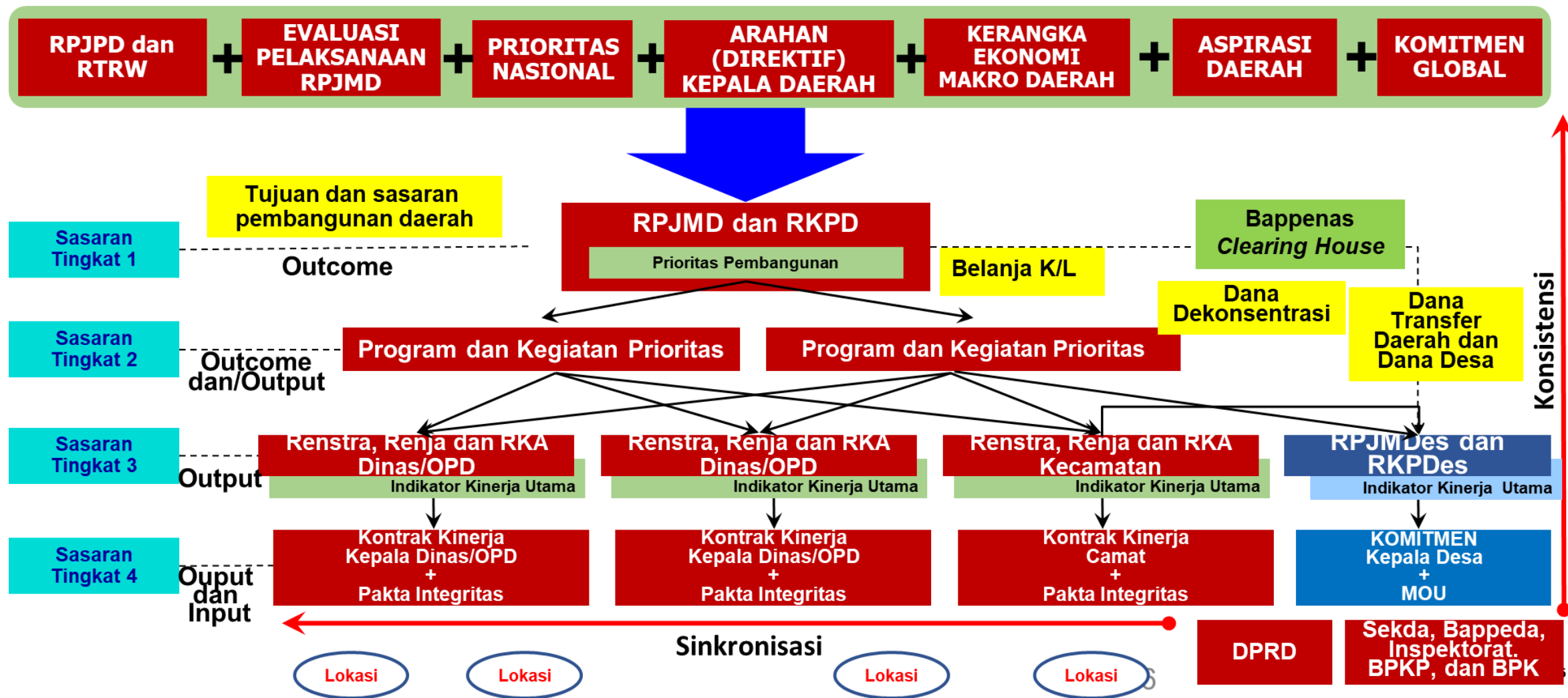


## Keterangan:

|     |                              |      |                            |
|-----|------------------------------|------|----------------------------|
| LPE | Laju Pertumbuhan Ekonomi     | IPM  | Indeks Pembangunan Manusia |
| TK  | Tingkat Kemiskinan           | GINI | Rasio Gini                 |
| TPT | Tingkat Pengangguran Terbuka | GRK  | Emisi Gas Rumah Kaca       |



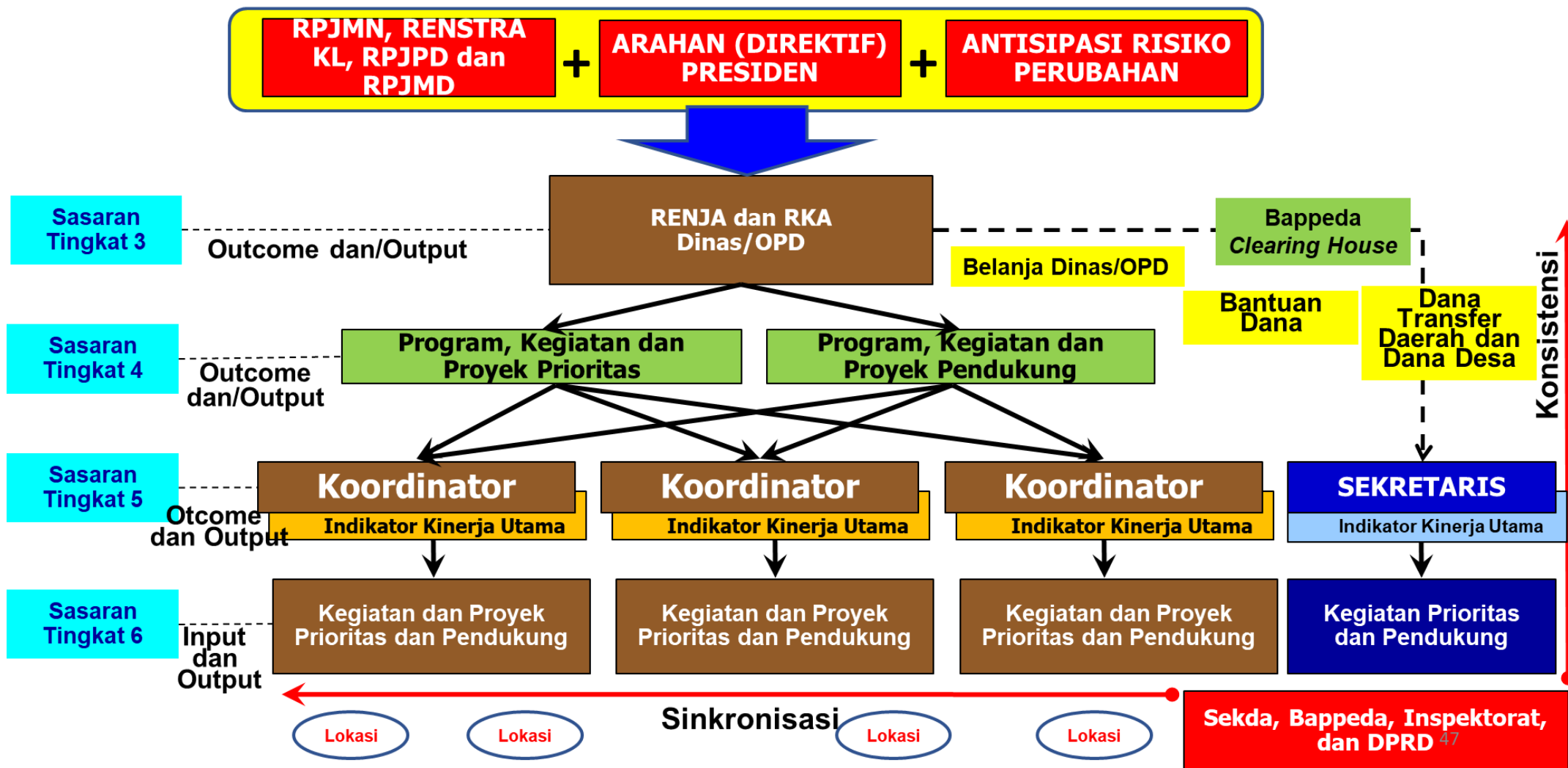
# Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah





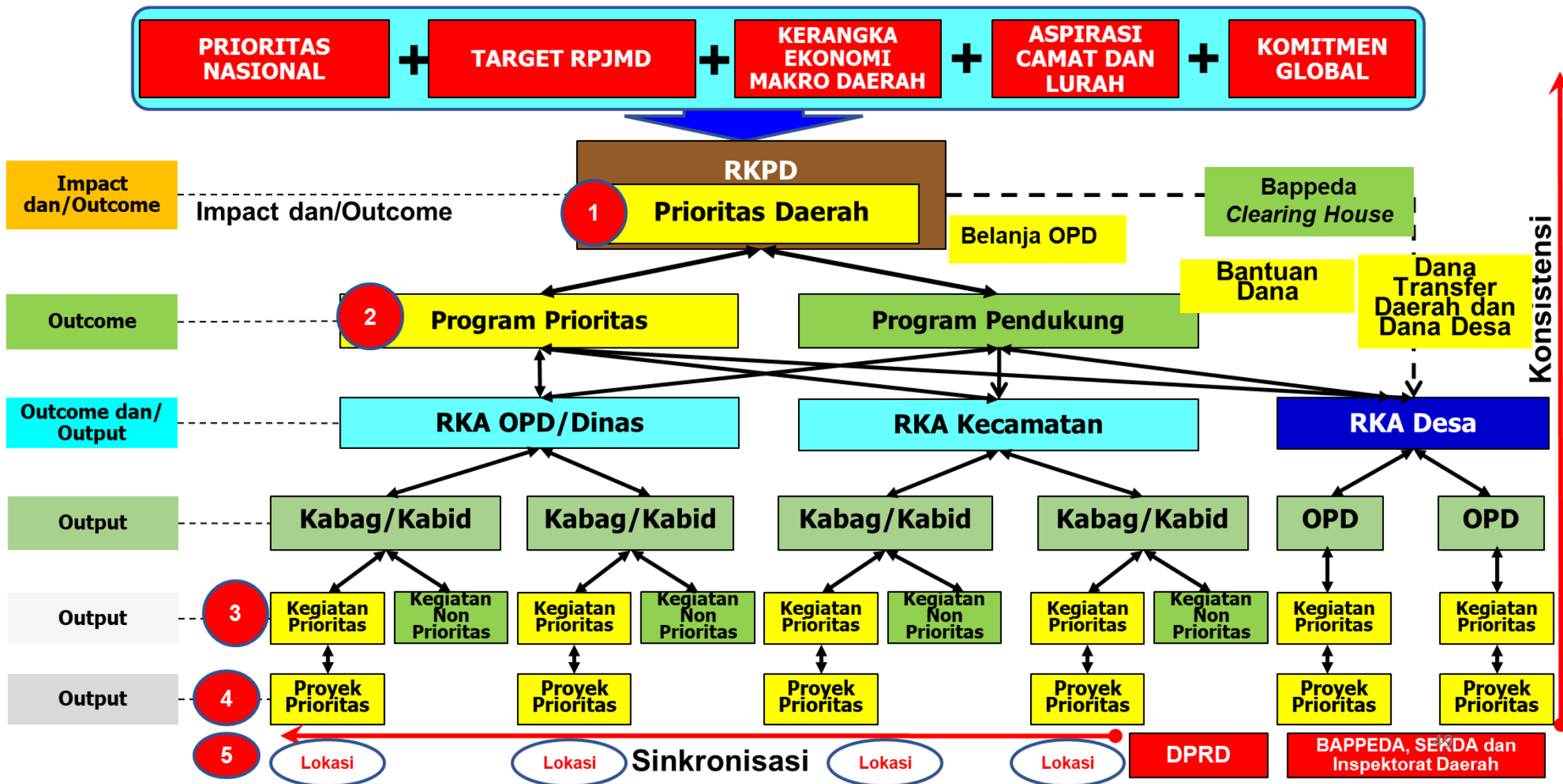


# Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah





# Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah







# Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak



# Kerjasama dan Kolaborasi Membangun Keunggulan



## KOMPARATIF

Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, aman dan berkelanjutan

Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga kerja terdidik, tangguh dan sadar bencana.

Kondisi ketertiban dan keamanan daerah yang stabil dan terjaga dengan baik.



Infrastruktur: jalan, pelabuhan, bandar udara, listrik, air bersih, dan jaringan transportasi yang modern dan tertata, infrastruktur kebencanaan yang siap.



## KOMPETITIF



Produksi dan jasa berstandar internasional

Iklm investasi dan iklim usaha yang mendukung



Pelaku bisnis yang bermutu tinggi dengan semangat kewirausahaan, profesional, disiplin dan etos kerja kuat; memiliki kemampuan manajerial dan jaringan luas.

Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan konsisten.

Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel

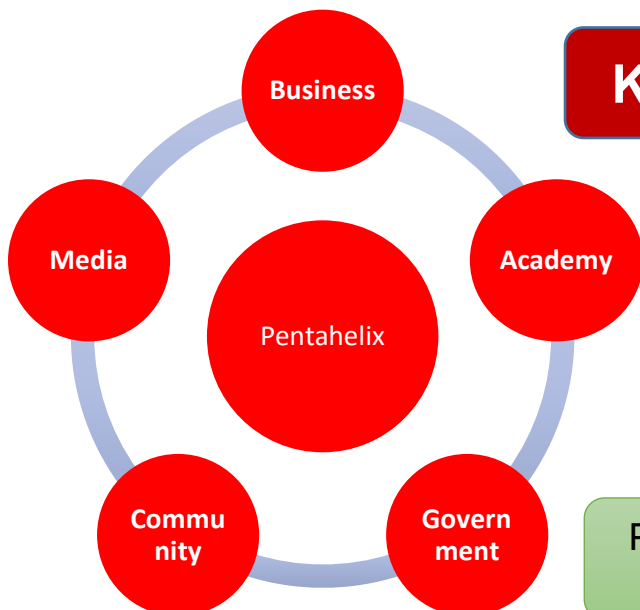
Kebijakan belanja atau investasi pemerintah yang jelas, konsisten, terukur dan berkesinambungan

## KOLABORATIF

Kerjasama dan kemitraan Pemerintah, Pemda, Pelaku usaha, Perguruan tinggi, Masyarakat dan Media dalam riset dan pengembangan teknologi dan inovasi unggulan



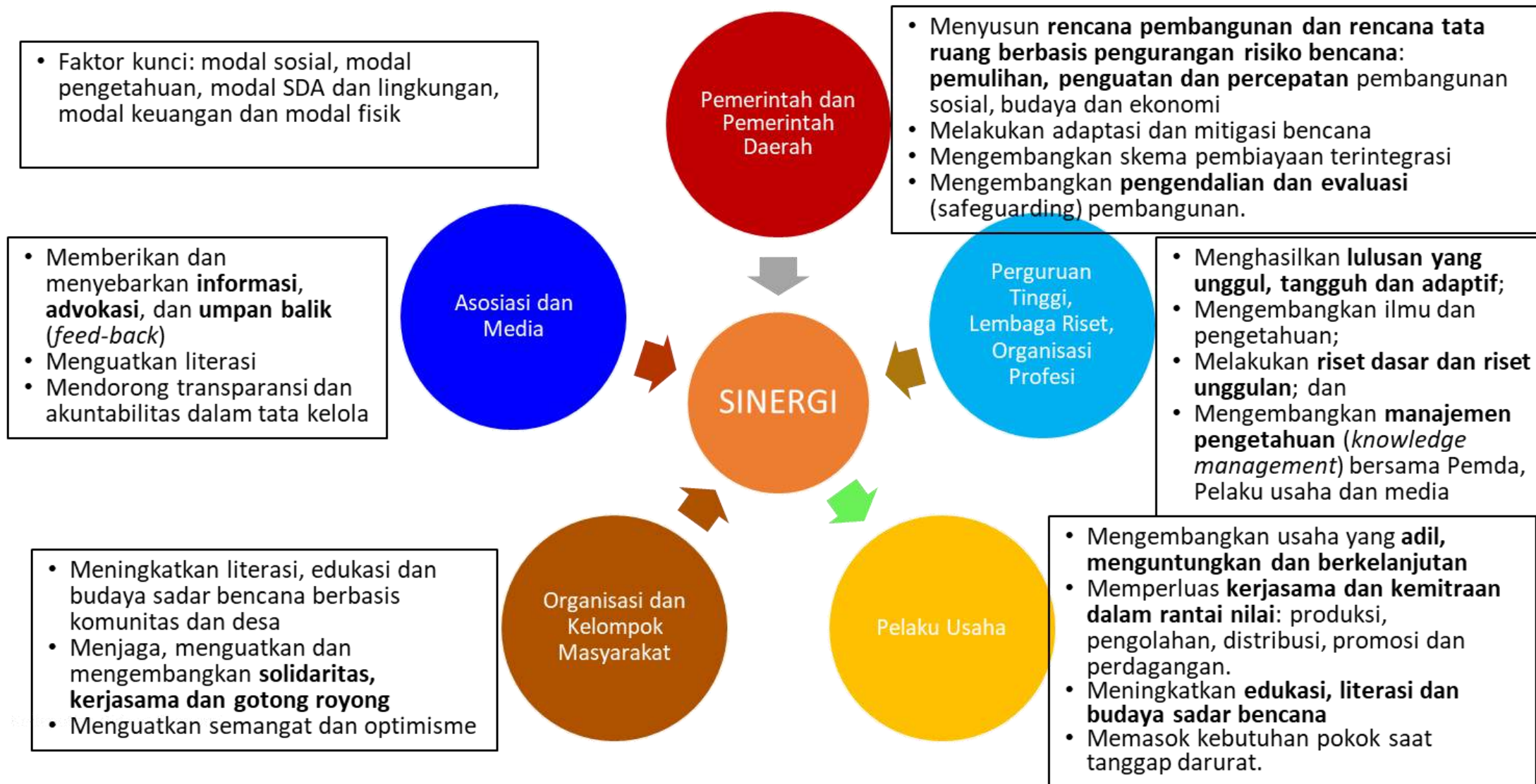
Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan perdagangan internasional yang kuat







# Kerjasama dan Kemitraan Peningkatan Kinerja Pembangunan





# What next?

## Agenda Kerjasama, Kemitraan dan Kolaborasi

### Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah

1. Proyek Kerjasama Investasi dan Perdagangan
2. Pengembangan Rantai Nilai Produksi dan Pariwisata
3. Penguatan dan Pengembangan Konektivitas
4. Mitigasi Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

### Kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian

1. Penyiapan Lulusan PT yang unggul, inovatif dan berkualitas
2. Pengembangan Riset Unggulan dan Proyek Unggulan
3. Penguatan Manajemen Pengetahuan
4. Peningkatan Kapasitas Aparat

### Kerjasama Pemerintah Daerah, Perbankan dan Swasta

1. Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kerjasama UMKM
2. Pembiayaan Investasi Produktif dan Penguatan Rantai Nilai
3. Perluasan Promosi dan Pemasaran
4. Pengembangan Teknologi dan Fasilitas Transformasi Digital

### Kerjasama Pemerintah Daerah, Masyarakat Sipil dan Mitra Pembangunan

1. Pengembangan Inovasi
2. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan
3. Pendampingan dan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat
4. Proyek Rintisan (*pilot project*)

### Kerjasama Pemerintah Daerah dan Media

1. Pemantauan Kinerja Pembangunan
2. Diseminasi Kebijakan dan Program Pembangunan
3. Literasi, Edukasi dan Budaya Pengetahuan
4. Pengawasan (*Watchdog*) dan Masukan (*Feedback*)

### Kerjasama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Luar Negeri

1. Berbagi Informasi dan Pengetahuan (*knowledge sharing*)
2. Alih Teknologi dan Peralatan
3. Perluasan Perdagangan dan Investasi
4. Peningkatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan





**Terima Kasih.**